Harian
JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E.,MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 864 TAHUN XX, 2 - 8 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Toto Marwoto Masuk Bursa Calon Wakil Bupati Ciamis

Ciamis, Jaya Pos

Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Shohibul Imam, memberikan dukungan penuh kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, H. Toto Marwoto, untuk masuk dalam bursa pemilihan Wakil Bupati Ciamis.

Toto dianggap sangat mumpuni untuk mendampingi Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya memimpin Ka-

▸▸ Halaman 5

Kedatangan jajaran pengurus PAN diterima langsung oleh jajaran pengurus NasDem.(Foto:Mamay)

Media Visit Jaya Pos ke Kantor Imigrasi Garut,
Pelayanan Paspor Kini Lebih Mudah Lewat Aplikasi M-Paspor

Garut, Jaya Pos

Dalam upaya memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang, Jaya Pos melaksanakan kunjungan jurnalistik atau Media Visit ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Selasa (27/10/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Jaya Pos dalam menjalankan fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat melalui pem-

▸▸ Halaman 5

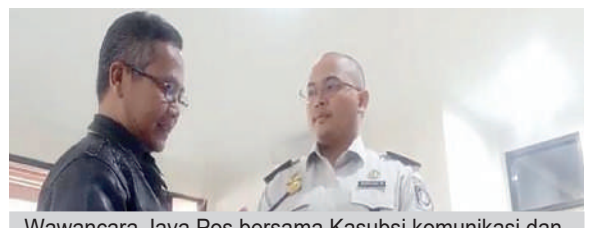

Wawancara Jaya Pos bersama Kasubsi komunikasi dan informasi kantor imigrasi Kabupaten Garut. (Foto/Hartono)

Karhutla Mereda, Ancaman Banjir Mengintai Kalsel, WALHI Soroti Kerusakan Lingkungan

Warga mengendarai sepeda motor saat melintas di samping api yang membakar hutan dan lahan di Kecamatan Sebangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. (Foto: Antara)

> Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan mulai mereda setelah hujan deras mengguyur sejumlah wilayah. Namun, ancaman bencana belum berakhir. Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) dikhawatirkan meningkatkan risiko banjir dan erosi saat musim hujan.

Kalimantan Selatan, Jaya Pos

Hujan deras mulai meredakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mengakhiri ancaman bencana. Setelah berminggu-minggu dilanda kekeringan dan kebakaran, wilayah ini kini menghadapi potensi banjir, erosi, serta kerusakan lingkungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas lahan yang terbakar di salah satu wilayah penanganan di Kalsel menyusut dari sekitar 75 hektare menjadi tersisa 4 hektare hingga Kamis (29/10/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut hujan lebat juga menyebabkan operasi modifikasi cuaca di Kalsel dibatalkan. Meski demikian, BNPB tetap mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sementara itu, data SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama BNPB mencatat total lahan terbakar di Kalsel sepanjang 2026 mencapai 8.019,63 hektare. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni 2.846,53 hektare, disusul Kabu-

▸▸ Halaman 5

Terima Kunjungan Danrem, Wako Hendri Arnis Dorong Sinergi Optimalkan Kawasan Strategis

Padang Panjang, Jaya Pos

Pemerintah Kota Padang Panjang mendorong penguatan kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan strategis, menata kota, serta menggali potensi sejarah yang dimiliki daerah tersebut.

Komitmen itu mengemuka saat Wali Kota Hendri Arnis menerima kunjungan silaturahmi Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Walikota, Rabu (21/10/2026).

Wako Hendri menyebutkan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret dalam menata sejumlah kawasan strategis di Padang Panjang agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Arm Hendriyana silaturrahmi dengan Wakil Walikota, Allex Saputra dan Sekda,Doni Hendra. (Foto/Kominfo)

"Ini adalah waktu yang kami tunggu-tunggu untuk duduk bersama membahas kawasan strategis di Padang Panjang agar dapat difungsikan secara optimal. Ada hal-hal yang perlu kita dudukkan dan rumuskan bersama antara TNI dan Pemko," ujarnya.

Menurut Hendri, Padang Panjang memiliki nilai sejarah dan potensi yang perlu dikembangkan melalui perencanaan yang terarah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat diperlukan agar penataan kota dapat berjalan dengan baik.

▸▸ Halaman 5

Wali Kota dan Ketua TP-PKK Padang Panjang Raih Penghargaan The Indonesia Leadership Matrix Award

Bali, Jaya Pos

Wali Kota Hendri Arnis dan Ketua TP-PKK Kota Padang Panjang Ny. Maria Feronika Hendri meraih penghargaan dalam ajang The Indonesia Leadership Matrix Award (ILMA) 2026 yang diselenggarakan Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat (16/10/2026).

Wako Hendri menerima penghargaan sebagai The Best Leader in Economic Digitalization, Urban Infrastructure Innovation, and Public Service Accountability. Sementara itu, Ny. Maria menerima penghargaan sebagai The Best Women Leader in Creative Economy Activation, Early Childhood Parenting, and Urban Literacy Development.

Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Seven Media Asia Eka Arismana disaksikan sejumlah kepala daerah, di antaranya gubernur Kalimantan Barat dan Papua Barat Daya, serta para bupati, wali kota, dan undangan lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala Dinas Perhubungan Fhandy Ramadhona.

Wali Kota Hendri Anis dan Ketua TP PKK menerima Penghargaan The leadership. (Foto Komimfo)

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan daerah dalam mendorong digitalisasi ekonomi, inovasi infrastruktur perkotaan, akuntabilitas pelayanan publik, serta pember-

▸▸ Halaman 5

Rombongan dari POLDA Banten saat pengecekan lokasi lahan. (Foto/Guns)

Kades Muncung Diduga Menjual Lahan 68.000 Meter Milik Warga dan Milik Negara Kepada PIK-2

Tangerang, Jaya Pos

Dugaan persoalan penguasaan dan penjualan tanah mencuat di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Muncung, Agus Purwadi, S.E., dipersoalkan terkait dugaan penjualan lahan seluas 68.000 meter persegi atau 6,8 hektare kepada pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Lahan tersebut dipersoalkan karena sebagian di antaranya diklaim sebagai tanah warisan keluarga Asiykin seluas 31.000 meter persegi, sedangkan 37.000 meter persegi lainnya diduga merupakan tanah negara yang berada dalam penguasaan atau tercatat sebagai aset Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kabupaten Tangerang.

Pihak ahli waris mempertanyakan dasar hukum dan alas hak yang digunakan Kepala Desa Muncung sehingga diduga dapat melakukan transaksi penjualan atas lahan tersebut. Asiykin selaku ahli waris menyatakan bahwa sebagian objek tanah yang dipersoalkan merupakan milik keluarganya. Pihaknya mengaku memiliki sejumlah dokumen pendukung terkait riwayat kepemilikan tanah tersebut.

Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Kholid Miqdar alias Mister, seorang aktivis yang aktif memperjuangkan persoalan keadilan masyarakat di wilayah Pantura Ka-

▸▸ Halaman 5

Wanoja Perjuangan Pangandaran Siap Advokasi Kekerasan Pada Perempuan

Pangandaran, Jaya Pos

Ratusan perempuan berpakaian putih memadati Aula salah satu hotel di Pangandaran, Rabu (28/10). Sedikitnya ada sekitar 200 perempuan, mereka merupakan perwakilan dari 93 desa di Kabupaten Pangandaran yang mengikuti pengukuhan pengurus Wanoja Perjuangan, organisasi perempuan di lingkungan PDI Perjuangan.

Tak sekadar membentuk kepengurusan, organisasi ini menargetkan penguatan peran perempuan di tingkat desa. Mulai dari penyaluran aspirasi, advokasi kasus kekerasan, hingga peningkatan kemandirian ekonomi perempuan.

Ketua Wanoja Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Ida Nurlaila Wiradinata mengatakan organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan dan menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung. “Nama Wanoja Perjuangan sendiri mengandung makna yang lebih dalam dari sekadar identitas organisasi. Nama

Ketua Wanoja Perjuangan Pangandaran, Ida Nurlaila Wiradinata. (foto: ist)

tersebut dimaknai sebagai mantra peradaban, yang memadukan kelembutan perempuan dengan keberanian untuk melawan ketidakadilan, “ katanya.

Wanoja dimaknai sebagai rahim kasih sayang, kelembutan yang meneduhkan, serta keanggunan yang menjaga kehormatan. Namun, ketika disandingkan dengan kata perjuangan, kelembutan itu menjelma menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan. “Perempuan dalam wadah PDI Perjuangan bukan sekedar pelengkap perjuangan, melainkan bagian penting dari tujuan perjuangan itu sendiri, “ kata Ida.

Perjuangan menjadi napas yang menghidupkan keteguhan, keberanian yang tidak padam oleh gelapnya persoalan, serta semangat yang tidak mudah luntur menghadapi berbagai tantangan. “Tentu keberadaan Wanoja Perjuangan mampu menjembatani suara hati dan aspirasi perempuan di daerah agar dapat di dengar serta ditindaklanjuti, “ ujar Ida. **(Mamay)**

Kompetisi Futsal Pelajar SMP/MTs Diharapkan Jadi Agenda Tahunan di Ciamis

SMPN 4 Ciamis keluar sebagai kampium pada ajang Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis. Sekaligus berhak mewakili ke tingkat Provinsi Jawa Barat. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Penyelenggaraan Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis tingkat SMP/MTs di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, diharapkan dapat menjadi agenda tahunan dalam kalender kegiatan pendidikan dan olahraga daerah.

Harapan tersebut mengemuka seiring suksesnya pelaksanaan turnamen yang diikuti oleh pelajar dari berbagai sekolah dan berlangsung kompetitif hingga laga final. Kompetisi futsal pelajar tingkat SMP/MTs ini tidak hanya menghadirkan persaingan antar sekolah, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bakat olahraga pelajar sejak usia dini.

Pada ajang ini, SMPN 4 Ciamis berhasil meraih Juara I kategori putra, setelah melalui rangkaian pertandingan yang ketat dan menjunjung tinggi nilai sportivitas dengan menghempaskan perlawanan dari SMPT Ar-Risalah Ciamis dengan score 4-0.

Ketua Umum AFKAB Ciamis, Nurdin Soleh, S.Pd., M.Pd., sebagai penyelenggara utama dari Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis kepada para awak media mengungkapkan tujuan dari kegiatan Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis diantaranya dalam rangka membina dan mencari atlet berprestasi. “Menjadi wadah pembinaan serta penjaringan atlet-atlet futsal muda berbakat dari kalangan pelajar (tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA) di Kabupaten Ciamis. Menyalurkan minat dan bakat dengan memberikan ruang positif bagi para pelajar untuk menyalurkan hobi, mengasah kemampuan, serta membangun pengalaman bertanding di bidang olahraga futsal, “ ungkap Nurdin.

Tujuan lainnya adalah menjunjung sportivitas dan membentuk karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, serta menanamkan sikap sportivitas dan semangat fair play serta mempererat persaudaraan, menjalin silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan antar-pelajar serta antar-sekolah di wilayah Ciamis dan sekitarnya.

Diakuinya, keberhasilan penyelenggaraan kompetisi ini menunjukkan tingginya antusiasme pelajar terhadap olahraga futsal. “Turnamen ini tidak semata-mata untuk mencari pemenang, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter pelajar melalui olahraga. “Melalui Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis ini, pelajar tidak hanya diasah kemampuan teknisnya, tetapi dibentuk pula nilai disiplin, kerja sama tim, dan sportivitas. Karena itu, kegiatan ini sangat layak untuk dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Nurdin, Rabu (28/10).

Apresiasi terhadap penyelenggaraan kompetisi futsal pelajar tingkat SMP/MTs juga disampaikan oleh Kepala SMPN 4 Ciamis, Memet Priadi, S.Pd.,M.Pd. Ia menilai Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan olahraga pelajar di Kabupaten Ciamis.

Menurutnya, jika menggelarnya secara rutin, kompetisi ini dapat menjadi sarana strategis dalam menjaring bibit atlet futsal yang berpotensi berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis ini sekaligus membuka ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pelajar SMP dan MTs.

Dengan dukungan berbagai pihak dan tingginya partisipasi peserta, Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. Hal ini sejalan dengan upaya mencetak generasi muda yang sehat, berprestasi, dan berkarakter.

Sementara itu berdasarkan pantauan japos.co, keberlangungan gelaran Student Futsal League (SFL) Regional Ciamis ini tidak terlepas dari peran aktif Polres Ciamis Polda Jawa Barat dalam melaksanakan pengamanan kegiatan Student Futsal League Regional Ciamis yang berlangsung di Gelanggang Galuh Taruna (GGT), Kabupaten Ciamis.

Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan pertandingan olahraga pelajar berjalan aman, tertib dan lancar serta memberikan rasa nyaman kepada peserta, panitia dan masyarakat yang hadir. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai (23/10).

Pengamanan melibatkan personel Unit Patroli Sat Samapta Polres Ciamis, Sat Intelkam Polres Ciamis, Polsek Ciamis, serta unsur TNI dari Koramil Ciamis. Personel melaksanakan pemantauan di sekitar lokasi kegiatan, mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan, serta melakukan patroli untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, seperti pencurian kendaraan bermotor dan pecah kaca kendaraan. **(Mamay)**

Pendidikan Pemilih Merupakan Bagian Penting Dalam Membangun Demokrasi

Ciamis, Jaya Pos

Pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan menjelang pemilu, tetapi perlu dibangun secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Upaya ini dinilai penting agar warga mampu menggunakan hak pilih secara bijak, memahami proses demokrasi dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar di Aula Hotel Tyara Ciamis, Senin (26/10).

Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan legislatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang berkualitas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengatakan pendidikan pemilih merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya dilihat dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar. “Pendidikan pemilih menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujar Andang.

Ditegaskannya, pendidikan pemilih perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sasaran edukasi tersebut meliputi generasi muda, pemilih pemula, kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, hingga kelompok yang membutuhkan akses informasi lebih luas.

Sekda Ciamis berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan

Sekda Ciamis, Andang Firman T, didampingi anggota DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dan unsur KPU RI, selepas sosialisasi pendidikan pemilih. (Foto:Mamay)

hak pilih secara cerdas, menyampaikan aspirasi, serta menentukan pilihan dengan pertimbangan yang matang. “Pendidikan pemilih berkelanjutan harus kita jadikan investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang sadar politik dan memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa, khususnya Kabupaten Ciamis,” harap Andang.

Sejalan dengan hal tersebut, Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat, menekankan bahwa kualitas pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Menurutnya, KPU mempersiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu, mulai dari regulasi, logistik, tata cara pelaksanaan, hingga petugas. Namun, kualitas demokrasi juga dipengaruhi oleh cara masyarakat menggunakan hak suaranya. Ia memaparkan empat ciri pemilih cerdas.

Pertama, memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih serta menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, menentukan pilihan berdasarkan program kerja dan gagasan yang ditawarkan peserta pemilu. Ketiga, menjaga etika dengan tidak menyebarkan kebencian maupun informasi yang belum terverifikasi. Keempat, ikut mengawasi pelaksanaan pemilu secara santun dan bertanggung jawab.

Purwoto juga mengingatkan masyarakat agar melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), daripada menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. “Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memahami hak dan kewajibannya, melihat program kerja, menjaga etika, serta mengawasi dengan santun. Jika ada yang tidak beres, laporkan kepada pengawas dan jangan langsung memviralkan informasi yang belum diverifikasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, etika demokrasi harus dijaga oleh seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun masyarakat. Perbedaan pilihan politik perlu disikapi secara dewasa agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tersebut turut menghadirkan Anggota DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa sebagai narasumber. Politisi Partai Golkar yang telah menjadi anggota DPR RI sejak 1997 itu saat ini mewakili daerah pemilihan Jawa Barat X dan bertugas di Komisi XI DPR RI.

Keterlibatan unsur legislatif, pemerintah daerah, dan KPU RI dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran pemilih dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga mampu menyaring informasi, menilai program peserta pemilu, serta menjalankan hak politik dengan penuh tanggung jawab.

Bagi Kabupaten Ciamis, peningkatan kesadaran politik masyarakat diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk membangun demokrasi yang inklusif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

(Mamay)

KPU Pangandaran Jadi Tuan Rumah

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional

Pangandaran, Jaya Pos

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diinisiasi langsung oleh KPU Republik Indonesia, bertempat di Ballroom Hotel Grand Palma Pangandaran, Minggu (10/10).

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, menjelaskan bahwa penunjukan daerahnya sebagai lokasi acara merupakan bagian dari agenda resmi nasional. Pihaknya mengaku mendapat mandat penuh untuk membantu kelancaran penyelenggaraan secara teknis di lapangan. “Kami menjadi tuan rumah sesungguhnya karena ini agenda KPU Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini

Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin. (foto: ist)

agenda yang dilaksanakan dan merupakan program KPU RI. Selaku KPU kabupaten, kami hanya diberikan mandat untuk menjadi penyelenggara teknis,” jelas Muhtadin selepas acara kegiatan.

Menurutnya, seluruh aspek krusial mulai dari penyusunan anggaran, mekanisme undangan, penentuan waktu, hingga penetapan lokasi kegiatan sepenuhnya diatur dan dikendalikan langsung oleh KPU RI. Peran KPU daerah lebih difokuskan pada kesiapan teknis pelaksanaan acara agar berjalan lancar.

Diungkapkannya, pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan tugas fundamental yang diemban oleh lembaga penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Tujuannya guna memberikan pendidikan politik serta meningkatkan kesadaran pemilih di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemilu. Selain mengikuti jalannya pemaparan materi dari para narasumber, pihak KPU Pangandaran juga menghadirkan akademisi lokal, di antaranya Dr. Oke dari Institut Nasional Nusantara (INN) Al Farabi Pangandaran serta narasumber Muhammad Ijudin.

Terkait komposisi peserta, kata Muhtadin, undangan dibagi menjadi dua sesi berbeda. Sesi pertama melibatkan pemilih pemula, sementara sesi berikutnya menghadirkan tokoh masyarakat, unsur pemerintah desa, dinas, badan, serta lembaga terkait yang bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan pemilu.

Melalui program sosialisasi ini, KPU berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya pendidikan politik serta proses pendewasaan pemilih.

“Dengan kegiatan ini tentu ada manfaat dan hal yang bisa diambil, yaitu adanya pendidikan pemilih, pendewasaan pemilih, serta mengetahui bagaimana syarat menjadi pemilih yang baik. Sehingga ke depan, pemilu yang dilaksanakan pada periode selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan bisa terselenggara lebih baik lagi,” pungkasnya.

(Mamay)

Porsiraksu Siap Lahirkan Wewey Baru

Noorman Subagja pemilik sekaligus pelatih Gerak Suci didampingi Ketua IPSI Kabupaten Ciamis, H. Ramli Mahmud berkomitmen untuk mencetak atlet-atlet Pencak Silat propesional. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Perguruan pencak silat Gerak Suci kembali menata langkah untuk menjaga warisan Adjat Sudrajat sekaligus melahirkan atlet berprestasi dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Setelah sempat vakum, perguruan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pencak silat di Ciamis ini berupaya menghidupkan kembali tradisi melalui pembinaan pesilat dari tingkat dasar. Upaya tersebut terlihat dalam Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Gerak Suci yang berlangsung di Gedung Golkar Ciamis, beberapa waktu lalu.

Sebanyak 46 anggota mengikuti gelombang pertama ujian, mulai dari pemula anak-anak dan remaja hingga pesilat yang menjalani kenaikan sabuk kuning ke hijau.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi tahapan untuk mengukur kemampuan anggota, tetapi juga bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus pencak silat yang mampu bersaing di arena kejuaraan.

Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Ciamis, H. Ramli Mahmud, turut mendorong Gerak Suci agar tidak berhenti pada upaya melestarikan tradisi. "Saya berharap perguruan tersebut mampu mengambil peran lebih besar dalwam mencetak atlet yang mengharumkan nama daerah," kata H. Ramli kepada japos.co, Kamis (29/10).

Ramli berharap Gerak Suci dapat melahirkan pesilat-pesilat berprestasi seperti Wewey Wita, atlet pencak silat asal Ciamis yang dikenal melalui kiprahnya di tingkat nasional dan internasional. Harapan itu menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi Gerak Suci untuk memperkuat pembinaan, menemukan bibit potensial dan mempersiapkan mereka agar mampu mengikuti jejak atlet kebanggaan Ciamis tersebut.

UKT tahun ini berlangsung dalam empat gelombang. Pada gelombang pertama, 46 peserta hadir dari perkiraan awal yang mendekati 80 orang. Sejumlah anggota tidak dapat mengikuti kegiatan karena sakit.

Pemilik sekaligus pelatih Gerak Suci, Noorman Subagja, mengatakan pembinaan di perguruannya telah menghasilkan sejumlah atlet yang meraih medali dalam berbagai kejuaraan pencak silat.

Dicontohkannya, dari 20 peserta yang pernah dikirim mengikuti salah satu kejuaraan, sebanyak 12 orang berhasil meraih medali emas, sedangkan peserta lainnya membawa pulang medali perak dan perunggu. "Tujuan kami bukan hanya membuat anggota bisa naik tingkat, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang ingin menjadi atlet. Kalau ada yang punya kemauan dan potensi, harus kita dorong dan bina," ujar Noorman.

Menurutnya, menjadi atlet membutuhkan proses panjang. Penguasaan teknik harus disertai kedisiplinan, latihan berkelanjutan, mental bertanding dan pengalaman mengikuti kejuaraan. Karena itu, UKT menjadi salah satu tahapan untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan anggota sekaligus mengenali potensi yang dapat dikembangkan melalui pembinaan berkelanjutan.

Bagi Noorman, menghidupkan kembali Gerak Suci bukan sekadar melanjutkan aktivitas sebuah perguruan. Ia juga memikul tanggung jawab menjaga warisan sang ayah, Adjat Sudrajat, yang dikenal sebagai seniman sekaligus atlet pencak silat Ciamis.

Gerak Suci berdiri pada era 1960-an. Adjat diketahui pernah berguru kepada Aom Tur'at, sosok yang dikenal sebagai pejuang Ciamis. Pada masa kejayaannya, terutama sekitar 1970-an hingga 1990-an, Gerak Suci disebut memiliki ribuan murid dari berbagai generasi. "Almarhum bapak pernah bercerita bahwa murid Gerak Suci pada masa itu mencapai ribuan orang jika dihitung dari berbagai generasi," kata Noorman.

Adjat mendedikasikan hidupnya untuk pencak silat hingga meninggal dunia pada 2004. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua IPSI Ciamis. Setelah kepergiannya, aktivitas Gerak Suci sempat terhenti sebelum Noorman kembali membuka perguruan tersebut pada 2017.

Sejak itu, Noorman berupaya mempertahankan karakter Gerak Suci sekaligus menyesuaikan metode latihan dengan kebutuhan masa kini. Teknik bela diri dikembangkan agar lebih sederhana dan berfokus pada keterampilan praktis untuk melindungi diri. Latihan rutin kini digelar setiap Sabtu di Gedung Golkar Ciamis. Perguruan ini terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan.

Selain memperkuat pembinaan internal, Noorman menilai kemajuan pencak silat Ciamis membutuhkan persatuan antar perguruan. Menurutnya, kerja sama melalui IPSI dapat membantu menciptakan pembinaan yang lebih terarah dan membuka peluang lebih luas bagi atlet untuk berkembang. Ia menyebut saat ini terdapat 27 perguruan yang telah bergabung dengan IPSI Ciamis.

Ia berharap perguruan lain yang belum bergabung dapat ikut berpartisipasi dalam membangun ekosistem pencak silat yang lebih kuat. "Harapan saya, semua perguruan bisa lebih bersatu untuk mendukung IPSI sebagai induk organisasi. Yang belum bergabung juga mudah-mudahan segera bergabung agar pembinaan pencak silat di Ciamis semakin kuat," ujarnya.

Noorman juga menekankan pentingnya kemandirian atlet dan perguruan. Dukungan pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus diiringi kesungguhan dalam berlatih, pembinaan yang konsisten, serta upaya nyata untuk meraih prestasi.

Tantangannya kini bukan hanya menjaga nama besar masa lalu, melainkan memastikan tradisi yang diwariskan Adjat Sudrajat terus hidup melalui generasi pesilat yang berkualitas. Melalui UKT, latihan rutin dan kesempatan mengikuti kejuaraan, Gerak Suci berupaya menjadikan warisan pencak silat sebagai jalan untuk membangun prestasi sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Ciamis. **(Mamay)**

DPRD Kabupaten Mojokerto Setujui Pencabutan Empat Perda

Gus Bupati: Wujudkan Kepastian Hukum dan Cegah Tumpang Tindih Regulasi

Bupati Mojokerto dan DPRD dalam rapat paripurna. (Foto/Ad)

Mojokerto, Jaya Pos

DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir dan persetujuan bersama terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto. Rapat berlangsung di Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan Raden Ajeng Basoeni Nomor 35, Kecamatan Sooko, Jawa Timur.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Bupati, Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian, Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta seluruh anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para camat se-Kabupaten Mojokerto.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir dan persetujuan terhadap pencabutan empat Perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi, dinamika hukum, serta kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam sambutannya, Gus Bupati menegaskan bahwa deregulasi melalui pencabutan sejumlah Perda merupakan langkah strategis untuk menata kembali sistem hukum daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Menurutnya, semangat pemerintah dalam menerbitkan berbagai regulasi terkadang justru menimbulkan persoalan baru apabila tidak diimbangi dengan evaluasi secara berkala. Banyaknya peraturan yang sudah tidak relevan berpotensi menciptakan tumpang tindih pengaturan atau hyper-regulation, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

"Semangat yang tinggi dalam menerbitkan regulasi sering kali memicu fenomena regulasi yang berlebihan. Banyaknya peraturan daerah yang kurang relevan tidak jarang justru menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan berpotensi memicu ketidakpastian hukum dalam implementasinya di lapangan," tutur Gus Bupati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencabutan Perda yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan merupakan bagian penting dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui evaluasi dan penyederhanaan regulasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap setiap peraturan yang masih berlaku benar-benar memiliki manfaat, selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebijakan deregulasi tersebut juga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih adaptif dan efektif.

"Oleh karena itu, langkah deregulasi melalui pencabutan peraturan daerah yang dinilai sudah tidak relevan menjadi sebuah langkah yang sangat krusial. Upaya ini dilakukan demi menata kembali aspek hukum di Kabupaten Mojokerto agar lebih tepat, efektif, dan responsif," tambahnya.

Gus Bupati juga menegaskan bahwa penataan regulasi merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Ia menilai, tumpang tindih regulasi atau overlapping regulation, yakni kondisi ketika dua atau lebih peraturan mengatur objek maupun kewenangan yang sama, harus dihindari. Sebab, kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum.

"Selain karena materi muatannya sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum dan kebutuhan riil masyarakat saat ini, langkah penataan ini menjadi wujud komitmen kita bersama untuk memangkas tumpang tindih regulasi. Dengan demikian, kepastian hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan secara maksimal bagi masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan terkait," tegasnya.

Sembilan Fraksi Sepakat

Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto, yakni Fraksi PKB, NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PKS, dan PAN, secara resmi menyatakan persetujuan terhadap pencabutan empat Perda Kabupaten Mojokerto.

Adapun empat Perda yang disetujui untuk dicabut meliputi Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Perda tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Perdes), serta Perda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Mojokerto dan pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Selain menyepakati pencabutan empat Perda tersebut, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pembahasan Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.

Raperda tersebut selanjutnya akan diajukan untuk mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui langkah penataan regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama DPRD berharap tercipta produk hukum daerah yang lebih sederhana, harmonis, dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

(Ad)

Tekan Kenakalan Remaja dan Perundangan

Kapolres Ciamis Sambangi SMPN 2 Ciamis Lewat Program Polisi Peduli Pendidikan

Ciamis, Jaya Pos

Kepolisian Resor (Polres) Ciamis terus memperkuat upaya preventif dalam menekan angka kenakalan remaja di wilayah hukumnya melalui Program Polisi Peduli Pendidikan.

Dalam perhelatan edukasi yang diselenggarakan di Aula SMPN 2 Ciamis, Senin (26/10), Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar secara langsung mengingatkan para pelajar untuk membentengi diri dari aksi perundangan (bullying), keterlibatan geng motor kriminal, bahaya narkoba, hingga berbagai perilaku negatif yang berpotensi merusak masa depan.

Tekan Kenakalan Remaja dan Perundangan, Kapolres Ciamis Sambangi SMPN 2 Ciamis Lewat Program Polisi Peduli Pendidikan. (Foto:Mamay)

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Program Prioritas Kapolri guna membentuk karakter generasi muda yang berintegritas sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sejak dini..

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar, SH.,S.I.K.,M.Si didampingi Kasat Binmas Polres Ciamis, Kepala SMPN 2 Ciamis, jajaran tenaga pendidik serta perwakilan siswa siswi.

Dalam arahannya, AKBP Eko Iskandar menyoroti maraknya aksi perundungan yang kini mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi verbal, hingga teror di media sosial. Ia mengajak para siswa membangun iklim pertemanan yang sehat serta tidak takut melaporkan setiap tindakan perundungan yang dialami maupun disaksikan.

Selain perundungan, Kapolres Ciamis menghimbau agar para siswa tidak tergiur bergabung dengan kelompok geng motor yang mengarah pada tindakan kriminal, aksi balap liar dan tawuran antar sekolah. Ia juga menekankan pentingnya mematuhi aturan jam malam serta menjauhi obat-obatan terlarang dan minuman keras. "Adik-adik harus fokus belajar, meraih cita-cita dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga serta sekolah. Jauhi perundungan, narkoba, geng motor yang mengarah pada tindak kriminal dan segala bentuk pergaulan negatif, " ujar AKBP Eko, Senin (26/10).

Ditegaskannya, bahwa kedisiplinan dan rasa tanggungjawab merupakan kunci utama bagi pelajar agar tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran pergaulan yang merugikan

Kapolres Ciamis memberikan perhatian khusus pada dinamika penggunaan media sosial di kalangan remaja. Ia meminta para pelajar lebih kritis menyaring informasi, memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya, serta menghindari ujaran kebencian maupun perundungan siber (cyberbullying). "Gunakan media sosial secara bijak, jangan mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar, serta berani melapor kepada guru atau pihak kepolisian apabila mengetahui tindakan yang melanggar hukum, " tegas AKBP Eko.

Melalui edukasi berkala ini, Polres Ciamis berharap lingkungan sekolah dapat menjadi ruang tumbuh yang aman, nyaman dan kondusif bagi siswa untuk meraih prestasi. Pihak sekolah beserta para siswa turut menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian dan sosialisasi pencegahan yang diberkan oleh jajaran kepolisian.

Polres Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dunia pendidikan melalui pembinaan generasi muda guna menekan angka kenakalan remaja demi terwujudnya kondusivitas kamtibmas di Kabupaten Ciamis.

Pihak sekolah dan para siswa menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Kapolres Ciamis beserta jajaran atas edukasi dan perhatian yang diberikan. "Kegiatan ini dinilai menjadi pengingat penting bagi pelajar untuk menghindari perilaku menyimpang serta lebih bijak dalam bergaul maupun menggunakan media sosial, " kata Kepala SMPN 2 Ciamis, H. Amar, S.Pd.,M.Pd.

Amar berterima kasih kepada pihak Polres Ciamis yang terus berkomitmen untuk terus mendukung dunia pendidikan melalui kegiatan edukasi dan pembinaan kepada generasi muda sebagai langkah preventif dalam mencegah kenakalan remaja serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Ciamis. **(Mamay)**

Operasi Patuh Toba 2026, Polres Langkat Perkuat Edukasi untuk Tekan Kecelakaan

Langkat, Jaya Pos

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Langkat menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas melalui sosialisasi langsung kepada pengendara di wilayah Kabupaten Langkat, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada hari ke Tiga Operasi Patuh Toba 2026 ini bertujuan meningkatkan disiplin pengguna jalan sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan dipimpin Kasat Lantas Polres Langkat IPTU Faradhila Lova Ayuningsih, S.Tr.K., S.I.K., dengan menyasar pengemudi dan masyarakat pengguna jalan di wilayah hukum Polres Langkat.

Sosialisasi, edukasi dilaksanakan di Jalan Medan Tanjung Pura KM 54 – 55 Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dilakukan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Langkat IPTU Faradhila Lova, mengatakan edukasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. "Melalui kegiatan ini, kami mengimbau masyarakat agar selalu disiplin dan berhati-hati saat berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujar IPTU Faradhila.

Polres Langkat menggelar Operasi Patuh Toba 2026, edukasi keselamatan berlalu lintas, (foto/ Humas Polres Langkat)

Selain memberikan pemahaman mengenai keselamatan berkendara, petugas juga menginformasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meminta bantuan kepolisian, termasuk saat menghadapi situasi darurat di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, maupun gangguan kemacetan yang membutuhkan penanganan petugas.

IPTU Faradhila, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku berkendara. Satlantas Polres Langkat menegaskan bahwa Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan persuasif. **(Fatimah)**

Bupati Way Kanan Dorong Perusahaan Salurkan CSR Tepat Sasaran

Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked (Foto: Humas Pemkab)

Way Kanan, Jaya Pos

Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., meminta perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta mengarahkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menetapkan empat sektor prioritas agar bantuan perusahaan lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Ayu saat menghadiri Rapat Koordinasi TJSP di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha, Kompleks Pemkab Way Kanan, Rabu (28/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

Dalam kesempatan itu, Ayu mengapresiasi perusahaan yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Way Kanan. Menurutnya, dunia usaha tidak hanya berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR.

Ayu mengatakan, kontribusi perusahaan perlu diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan data Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027, pertumbuhan ekonomi Way Kanan pada 2025 mencapai 5,34 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 34,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap 57,57 persen tenaga kerja. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,98 dan angka kemiskinan turun menjadi 9,36 persen.

Menurut Ayu, capaian tersebut perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan. Karena itu, program CSR diharapkan tidak hanya berupa kegiatan sosial, tetapi juga mendukung sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemkab Way Kanan mendorong kontribusi CSR pada empat klaster prioritas sesuai arah pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, khususnya penguatan sumber daya manusia dan ekonomi lokal pada 2027.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, perusahaan diharapkan membantu penyediaan fasilitas pelayanan dasar, mendukung pendidikan, serta mempercepat penanganan stunting.

Di sektor ekonomi, perusahaan didorong menjalin kemitraan dengan petani dan pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan memperkuat rantai pasok komoditas unggulan daerah dan meningkatkan kemampuan usaha masyarakat. Adapun kontribusi di bidang lingkungan dan permukiman dapat diarahkan pada penyediaan air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, penghijauan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana di tingkat kampung.

Ayu juga meminta agar penyaluran CSR didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Untuk mendukung ketepatan sasaran, Pemkab Way Kanan menyiapkan data berbasis *by name by address* melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Terkait persoalan perbaikan jalan yang sering menjadi perhatian masyarakat, Ayu menjelaskan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan perbaikan maupun pemeliharaan jalan.

Namun, menurutnya, perusahaan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi melalui program CSR pada berbagai sektor prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Way Kanan, Hendri Syahri, menilai Forum TJSP perlu diperkuat sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi program CSR perusahaan.

Melalui forum tersebut, program perusahaan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Dengan begitu, bantuan CSR tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah.

Pemkab Way Kanan berharap rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan program TJSP.Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan dasar, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan demi mewujudkan Way Kanan yang Mandiri dan Sejahtera. **(Suhaili)**

Soroti Tenaga Kerja Lokal hingga CSR

Sedarita Ginting Perjuangkan Hak Masyarakat Sekitar PT Kinar Lapiga

Langkat, Jaya Pos

Anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Sedarita Ginting, S.H., M.H., menaruh perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat di sekitar PT Kinar Lapiga Perkebunan Tambunan. Perusahaan tersebut diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Desa Lau Tepu, Desa Ujung Bandar, Desa Pamah Tambunan, dan Desa Turangi, Kecamatan Salapian.

Upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang melibatkan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Langkat bersama pihak PT Kinar Lapiga Perkebunan Tambunan, Camat Salapian, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, para kepala desa di sekitar kawasan perkebunan serta masyarakat Kecamatan Salapian,.

Saat dimintai keterangan pada Rabu (21/10/2026), Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Langkat, Sedarita Ginting, menyampaikan bahwa hasil RDP menekankan pentingnya komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama melalui prioritas perekrutan tenaga kerja lokal, pemeliharaan jalan umum dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Sedarita, PT Kinar Lapiga diketahui memiliki areal perkebunan seluas 406 hektare dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang terdiri atas tujuh bidang. Namun, keberadaan perusahaan tersebut dinilai masih perlu diiringi dengan perhatian yang lebih besar terhadap aspirasi masyarakat, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan, pemerataan kesempatan kerja serta penyaluran bantuan sosial bagi warga di sekitar perkebunan.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi Desa Pamah Tambunan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkebunan. Bahkan, kantor desa tersebut berada di tengah kawasan perkebunan. Meski demikian, permintaan masyarakat kepada perusahaan untuk membantu pembangunan jambur sebagai sarana kegiatan sosial dan kemasyarakatan hingga kini belum terealisasi.

Sedarita Ginting anggota DPRD Langkat terima aspirasi warga Kecamatan Salapian. (foto/Humas DPRD Langkat)

Padahal, lanjut Sedarita, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan perusahaan tersebut maju dan sukses karena dinilai berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta pembangunan di wilayah sekitar.

Ia mengakui bahwa perusahaan telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya berupa beras, material untuk penanganan jalan longsor dan peralatan olahraga. Namun, menurutnya, pelaksanaan CSR tidak semestinya hanya berorientasi pada pemberian bantuan sesaat, melainkan harus dirancang secara berkelanjutan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pelaksanaan CSR harus mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Selain itu, Sedarita mendorong perusahaan agar lebih melibatkan masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Salah satunya dengan memberikan peluang yang wajar kepada warga untuk memperoleh penghasilan melalui aktivitas pengumpulan berondolan sawit, sepanjang sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Terkait pelaksanaan CSR, Sedarita juga mengingatkan PT Kinar Lapiga agar memahami dan menjalankan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 terkait tenaga kerja lokal.

Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut penting agar tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan secara terarah, transparan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di lingkungan operasionalnya.

Sedarita turut menegaskan agar pihak perusahaan tidak melakukan intimidasi, tekanan, maupun tindakan pemberhentian terhadap karyawan yang menyampaikan aspirasi dalam forum RDP. Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati hak masyarakat dan pekerja untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa rasa takut terhadap kemungkinan adanya tindakan yang merugikan.

Berdasarkan hasil RDP, terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian dan tuntutan kepada PT Kinar Lapiga Perkebunan Tambunan.

Pertama, memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan karyawan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan. Kedua, meningkatkan kepedulian terhadap pemeliharaan jalan umum serta melaksanakan program CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, melakukan pembenahan terhadap manajemen dan struktur organisasi perusahaan guna meningkatkan tata kelola serta hubungan dengan masyarakat sekitar.

Sedarita berharap hasil RDP tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan komitmen yang jelas dari pihak perusahaan.

"DPRD Kabupaten Langkat berharap PT Kinar Lapiga Perkebunan Tambunan dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat di Kecamatan Salapian. Dengan komunikasi yang baik dan komitmen yang jelas, keberadaan perusahaan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan," pungkas Sedarita yang pernah sebagai praktisi hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pemerhati HAM.

(AN)

Kapolres Langkat Salurkan Bantuan Sapi untuk HUL ke-103 Tuan Guru Babussalam

Langkat, Jaya Pos

Dukungan terhadap pelaksanaan Haul (HUL) ke-103 Tuan Guru Babussalam di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., berupa bantuan satu ekor sapi untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan haul, Kamis (29/10/2026)

Bantuan disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pelaksanaan peringatan haul Syekh Abdul Wahab Rokan yang menjadi momentum penting bagi jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam.

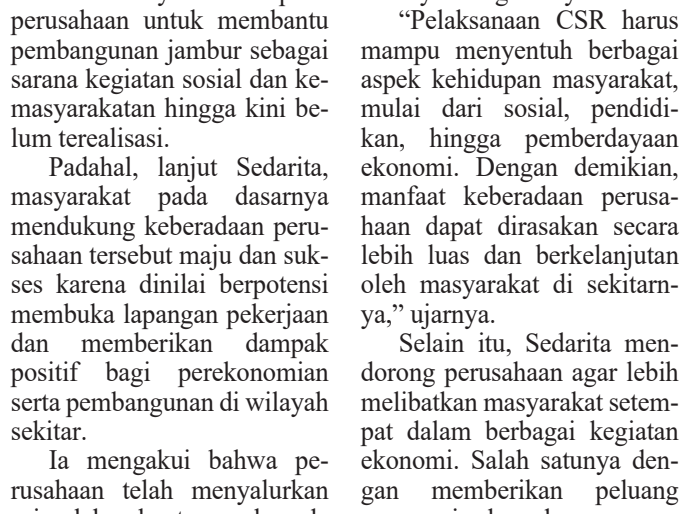

Kapolres Langkat serahkan satu ekor sapi memperingati haul Syekh Abdul Wahab Rokan ke-103. (foto/ Humas Polres Langkat)

Syeikh H. Ismail Royan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan Kapolres Langkat untuk mendukung kesuksesan kegiatan keagamaan tersebut.

Bantuan satu ekor sapi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pelaksanaan acara puncak HUL ke-103 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 1 November 2026.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kelancaran dan kekhidmatan kegiatan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan jamaah yang menghadiri peringatan haul di kawasan religius Babussalam.

"Bantuan berupa satu ekor sapi dari Kapolres Langkat ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan HUL ke-103 Tuan Guru Babussalam dan memberikan manfaat bagi seluruh jamaah yang hadir," ujar Syeikh H. Ismail Royan.

Melalui dukungan Ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar, aman, dan penuh kekhidmatan. Kepedulian ini juga menjadi wujud sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan serta menjaga kerukunan di Kabupaten Langkat.

Polres Langkat terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan dan kepedulian, sejalan dengan semangat Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman."

(Fatimah)

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Kades Muncung Diduga Menjual Lahan ..... *Halaman 1*

bupaten Tangerang. Kholid mengaku telah mempelajari sejumlah dokumen dan data pertanahan yang disampaikan pihak ahli waris.

Menurut Kholid, persoalan mendasar yang harus terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah bidang tanah seluas 68.000 meter persegi yang dipersoalkan benar-benar masuk dalam objek lahan yang diduga telah dijual oleh Kepala Desa Muncung kepada pengembang PIK 2.

Untuk memastikan letak, luas, serta batas-batas bidang tanah yang disengketakan, Kholid menyatakan perlunya dilakukan constatering atau pencocokan objek tanah secara langsung dengan dokumen dan data pertanahan yang tersedia.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan objek sengketa. Sebab, persoalan utama bukan hanya menyangkut klaim kepemilikan, tetapi juga kepastian apakah bidang tanah yang diklaim sebagai tanah warisan keluarga Asiykin benar-benar berada dalam area transaksi penjualan kepada pengembang PIK 2.

Kholid menegaskan, pihaknya tidak serta-merta mempersoalkan posisi PIK 2 sebagai pihak pembeli. Namun, menurutnya, setiap penguasaan dan peralihan hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang sah serta sesuai dengan objek bidang tanah yang sebenarnya.

"PIK 2 tidak boleh menguasai tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas. Apabila tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris ternyata berada di luar batas bidang tanah yang diperjualbelikan, tentu harus ada penjelasan mengenai dasar hukum penguasaan tanah tersebut," tegas Kholid.

Ia juga meminta agar seluruh dokumen pertanahan yang menjadi dasar penguasaan dan transaksi lahan diperiksa secara objektif. Dokumen yang perlu ditelusuri antara lain buku Letter C, peta rincik, peta bidang tanah, surat ukur, riwayat kepemilikan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan status dan peralihan hak atas tanah.

Pihak ahli waris berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta Pemerintah Kabupaten Tangerang segera memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan terhadap status lahan yang dipersoalkan.

Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang juga diminta menelusuri persoalan tersebut, mengingat Kepala Desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah lahan yang dipersoalkan merupakan tanah milik masyarakat, tanah milik desa, atau aset negara yang berada dalam penguasaan perangkat daerah.

Dugaan Keterkaitan dengan Aset Negara

Persoalan ini semakin serius karena sebagian lahan yang dipersoalkan, yakni sekitar 37.000 meter persegi, diduga merupakan tanah negara yang berada dalam penguasaan atau tercatat sebagai aset Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.

Jika benar bidang tanah tersebut merupakan aset negara atau aset pemerintah daerah, maka status, kewenangan pengelolaan, serta dasar hukum setiap bentuk pemanfaatan maupun peralihannya harus ditelusuri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui pengakuan kepemilikan atau keterangan sepihak. Diperlukan pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, serta pencocokan fisik di lapangan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Tim berbagai media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya DPMPD Kabupaten Tangerang, terkait keberatan ahli waris dan dugaan penjualan lahan yang sebagian diklaim sebagai aset negara tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan.

(GUNS)

Toto Marwoto Masuk Bursa ..... *Halaman 1*

bupaten Ciamis. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Shohibul Imam saat mengikuti rangkaian kegiatan Partai Nasdem yang dilaksanakan di Gedung Tarekah PGRI, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis.

Menurut Shohibul Imam, Toto Marwoto merupakan salah satu kader terbaik Partai Nasdem yang memenuhi kriteria dan memiliki segudang pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis. "Jika Toto Marwoto dianggap layak dan pantas mendampingi Bupati Ciamis, maka kami dari Partai Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada dirinya. Apalagi beliau ini merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki Partai Nasdem saat ini," jelas Shohibul, Selasa, (27/10).

Ia menyampaikan, jika dilihat dari sisi kompetensi, sebelum menjadi kader Partai Nasdem, Toto Marwoto meniti karier birokrasi dari bawah hingga puncaknya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda).

Dengan latar belakang tersebut, Toto diyakini sangat memahami alur birokrasi di Kabupaten Ciamis. Selain itu, secara kehidupan pribadi di luar kedinasan, Shohibul melihat bahwa Toto Marwoto memiliki kedekatan emosional yang baik dengan Bupati Ciamis saat ini, seperti sering berolahraga bersama.

Terkait pengerucutan nama-nama kandidat calon wakil bupati, Shohibul Imam menegaskan bahwa penentuan siapa yang akan mendampingi Bupati memerlukan kerja-kerja politik serta koalisi dengan partai-partai pengusung lainnya guna menyamakan visi dan persepsi. "Dan saya harap juga Partai Nasdem di Kabupaten Ciamis ini bisa melakukan silaturahmi dengan partai-partai lain dalam rangka membahas pemilihan Wakil Bupati Ciamis tersebut," tegasnya.

Sebagai perwakilan dari DPR RI sekaligus kader yang merepresentasikan daerah pemilihan (Jawa Barat X), Shohibul menegaskan bahwa partainya akan mendorong penuh kader-kader potensial. Namun, ia juga menekankan pentingnya kecocokan (chemistry) dan keselarasan visi antara bupati dan wakil bupati ke depan.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Ade Sudrajat, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti dan menghargai arahan dari Pengurus DPD Ciamis dalam menentukan sosok yang pantas mendampingi Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.

Senada dengan hal tersebut, Agung selaku perwakilan Bappilu DPC Nasdem Banjaranyar menegaskan bahwa jajaran akar rumput, mulai dari tingkat kecamatan hingga ranting desa, sepakat untuk bulat mengusung Ketua DPD Nasdem Ciamis agar mendampingi Pa Herdiat Sunarya.

Safari Politik DPD PAN Ciamis

Sebelumnya, Senin, (12/10) dinamika politik di Kabupaten Ciamis kian menghangat menyusul langkah DPD Partai Amanat Nasional (PAN) yang gencar melakukan safari dan sowan politik ke sejumlah pengurus partai daerah (DPD/DPC). Langkah ini dilakukan PAN untuk menyodorkan nama usulan calon Wakil Bupati Ciamis guna mengisi kekosongan jabatan pascameninggalnya almarhum Yana D Putra.

Salah satu partai yang disambangi PAN adalah DPD Partai NasDem Kabupaten Ciamis. Kedatangan jajaran pengurus PAN diterima langsung oleh jajaran pengurus NasDem dalam suasana silaturahmi politik, di Kantor DPD Nasdem Ciamis.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Ciamis, Toto Marwoto, menegaskan bahwa partainya sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin berkomunikasi politik. Namun, NasDem tidak akan gegabah dan menetapkan sejumlah kriteria pertimbangan matang sebelum menentukan arah dukungan.

"Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, proses pengisian posisi wakil bupati membutuhkan kesamaan pandangan dan rekomendasi bersama di internal koalisi politik. Oleh karena itu, seluruh usulan yang masuk, termasuk dorongan kader internal NasDem sendiri, akan digodok secara mendalam melalui mekanisme internal partai hingga rekomendasi resmi dikeluarkan oleh tingkatan pengurus yang berwenang, " tandas Toto.

(Mamay)

Karhutla Mereda, Ancaman Banjir Mengintai ..... *Halaman 1*

paten Banjar 1.629,82 hektare dan Hulu Sungai Selatan 1.594,67 hektare.

Ancaman banjir bahkan mulai dirasakan masyarakat. Sehari sebelum laporan tersebut, cuaca ekstrem dan banjir melanda Kabupaten Banjar dengan dampak sedikitnya 175 jiwa.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, mengingatkan bahwa hujan tidak serta-merta memadamkan seluruh titik api. Pada kondisi tertentu, hujan ringan justru dapat membuat asap dari sisa pembakaran semakin terlihat.

BPBD Kalsel juga menyatakan penanganan karhutla masih berlangsung dan status siaga belum dicabut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel, Muhammad Pormadi Dharma, mengatakan personel tetap disiagakan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Berdasarkan prakiraan BMKG, awal musim hujan di Kalsel tidak terjadi secara bersamaan. Sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November, sedangkan wilayah lainnya baru menyusul pada pertengahan Desember 2026.

Kerusakan DAS Tingkatkan Risiko Banji

Guru Besar Geofisika, Meteorologi, dan Hidrologi Sumber Daya Air IPB University, Prof. Hidayat Pawitan, menjelaskan bahwa kerusakan tutupan hutan dapat memperbesar risiko banjir dan erosi.

Menurutnya, lapisan tanah subur di Kalimantan relatif tipis. Dalam kondisi hutan yang masih terjaga, pepohonan berakar dalam membantu melindungi tanah dan mengatur aliran air. Namun, pembalakan dan hilangnya tutupan hutan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menahan serta menyerap air hujan.

Hidayat menerangkan, tanah yang mengering akibat kemarau dan kebakaran dapat mengalami perubahan struktur ketika dihantam hujan deras. Partikel tanah menjadi halus dan berpotensi menutup pori-pori, sehingga air sulit meresap ke dalam tanah.

Akibatnya, air lebih banyak mengalir di permukaan dan meningkatkan risiko banjir serta erosi. Tanah subur yang tersisa juga dapat terbawa aliran air menuju sungai.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pendangkalan sungai dan waduk akibat penumpukan sedimen. Jika berlangsung terus-menerus, kerusakan lahan dapat semakin luas dan menurunkan produktivitas lingkungan.

Hidayat juga mengingatkan bahwa perubahan kondisi daerah aliran sungai (DAS) membuat debit sungai lebih mudah berfluktuasi. Sungai yang mengalami penyusutan saat kemarau dapat meluap ketika hujan deras turun.

WALHI Kalsel menilai karhutla dan banjir berulang tidak cukup dijelaskan sebagai dampak perubahan cuaca. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti persoalan tata kelola ruang, kerusakan ekosistem, serta luasnya izin industri ekstraktif di Kalimantan Selatan.

WALHI juga mengklaim lebih dari 60 persen titik kebakaran di Kalsel terkonsentrasi di kawasan konsesi perusahaan. Menurut Raden, penanganan kebakaran di wilayah konsesi merupakan tanggung jawab pemegang izin.

Selain itu, WALHI mencatat adanya kerusakan anak sungai dan kawasan rawa gambut yang selama ini berfungsi menampung air hujan. Kondisi tersebut dinilai memperlemah kemampuan alam dalam mengendalikan limpasan air.

Atas berbagai persoalan itu, WALHI mendesak pemerintah mengevaluasi izin perusahaan secara menyeluruh dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin sesuai hasil pemeriksaan.

WALHI juga meminta pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk industri berbasis lahan berskala besar di Kalsel sampai daya dukung dan daya tampung lingkungan dievaluasi.Di tengah ancaman karhutla dan banjir, BPBD Kalsel menyatakan telah membagi personel berdasarkan tugas dan kemampuan masing-masing. Tim disiapkan untuk pemadaman kebakaran, pelayanan dapur umum, pengelolaan tempat pengungsian, hingga penyelamatan saat banjir.

Pemerintah daerah juga melakukan sejumlah langkah mitigasi, antara lain normalisasi aliran sungai, operasi modifikasi cuaca, serta pembangunan kolam regulasi di Hulu Sungai Tengah untuk mengurangi risiko luapan air.

BPBD juga mendorong peningkatan anggaran pencegahan, penegakan aturan tata ruang, penguatan logistik, serta penyediaan jalur komunikasi darurat. Simulasi evakuasi secara berkala dinilai penting agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana.

Sementara itu, WALHI menilai sistem peringatan dini harus diikuti tindakan nyata, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan karhutla. Persoalan lingkungan di Kalsel kini menjadi peringatan bahwa berakhirnya kebakaran belum tentu berarti ancaman bencana telah selesai. Tanpa pembenahan tata kelola hutan, sungai, dan perizinan, masyarakat berisiko terus menghadapi siklus kebakaran saat kemarau dan banjir ketika musim hujan.**(red)**

Media Visit Jaya Pos ..... *Halaman 1*

beritaan yang faktual, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan Media Visit ini, Jaya Pos menggali informasi secara langsung dari jajaran Kantor Imigrasi Garut, mulai dari sistem pelayanan paspor, persyaratan administrasi, tarif, layanan prioritas, hingga berbagai inovasi pelayanan keimigrasian bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Zulfikar, menjelaskan berbagai perkembangan pelayanan yang telah dilaksanakan sejak kantor tersebut mulai beroperasi pada 25 Januari 2026.

Menurut Zulfikar, Kantor Imigrasi Garut berdiri bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Imigrasi dan diresmikan pada 29 Januari 2026 oleh Bupati Garut bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pelayanan Paspor Berbasis Digital Melalui M-Paspor

Zulfikar menjelaskan, saat ini proses permohonan paspor telah didukung sistem pendaftaran secara daring melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui Play Store.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, memilih jadwal kedatangan, sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sebelum mendatangi kantor imigrasi.

Setelah melengkapi persyaratan, pemohon melakukan pembayaran melalui layanan mobile banking maupun ATM. Bukti pembayaran dan jadwal kedatangan selanjutnya menjadi bagian dari proses pelayanan di kantor imigrasi.

Dengan sistem pendaftaran daring tersebut, masyarakat memperoleh kepastian jadwal pelayanan sehingga proses permohonan paspor dapat berlangsung lebih tertib.

Terkait biaya, Zulfikar menyampaikan bahwa tarif paspor biasa sebesar Rp350.000 untuk masa berlaku lima tahun dan Rp650.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Sementara itu, paspor elektronik dikenakan biaya Rp550.000 untuk masa berlaku lima tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.

Paspor Rusak atau Hilang Wajib Melalui Pemeriksaan

Kantor Imigrasi Garut juga memberikan penjelasan mengenai prosedur penggantian paspor yang rusak maupun hilang.

Untuk paspor yang mengalami kerusakan, pemohon diwajibkan mengikuti proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna mengetahui penyebab dan kondisi kerusakan paspor. Sesuai ketentuan yang disampaikan, pemohon dikenakan denda sebesar Rp500.000.

Sementara itu, bagi pemegang paspor yang kehilangan dokumen tersebut, terlebih dahulu harus mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Selanjutnya, pemohon menjalani pemeriksaan melalui mekanisme BAP di kantor imigrasi dengan denda sebesar Rp1 juta.

Sediakan Layanan Prioritas dan Percepatan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Imigrasi Garut juga menyediakan layanan prioritas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Layanan tanpa antrean tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas, anak-anak berusia 0–5 tahun, serta lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas. Bahkan, pendamping pemohon juga diperbolehkan ikut serta untuk membantu kelancaran proses pelayanan.

Selain itu, tersedia pula layanan percepatan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti pasien yang harus menjalani pengobatan ke luar negeri, keperluan beasiswa pendidikan, maupun kebutuhan pekerjaan yang tidak dapat ditunda.

Pemohon cukup datang dengan membawa dokumen pendukung yang membuktikan urgensi kebutuhan tersebut, antara lain surat keterangan dokter, surat dari perusahaan, atau surat dari instansi pendidikan.

Tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, Kantor Imigrasi Garut juga menghadirkan inovasi layanan jemput bola. Melalui layanan ini, petugas dapat mendatangi langsung tempat tinggal maupun lokasi kerja pemohon berdasarkan permohonan resmi.

Masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut dapat mengajukan surat permohonan dengan melampirkan identitas dan data pendukung agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas imigrasi.

Proses Biometrik hingga Paspor Selesai

Zulfikar juga menjelaskan alur pelayanan bagi masyarakat yang datang langsung ke Kantor Imigrasi Garut.

Pemohon dapat meminta bantuan petugas keamanan (security) untuk mendapatkan arahan menuju bagian verifikasi persyaratan. Setelah dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan, pemohon akan memperoleh nomor antrean untuk mengikuti tahapan pelayanan biometrik.

Tahapan tersebut meliputi pengambilan foto, wawancara, serta perekaman sidik jari. Selain memberikan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), Kantor Imigrasi Garut juga menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA), baik yang datang sebagai wisatawan maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia sesuai ketentuan keimigrasian.

Terbuka terhadap Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan

Dalam hal pengaduan masyarakat, Zulfikar mengakui bahwa keluhan terhadap pelayanan publik merupakan hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan, Kantor Imigrasi Garut juga memanfaatkan berbagai platform media sosial serta menyediakan layanan konsultasi melalui WhatsApp.

Bahkan, layanan informasi melalui media sosial tetap aktif selama tujuh hari, termasuk pada hari libur, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan berkonsultasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor.

Media Visit Jaya Pos ini sekaligus menjadi sarana membangun komunikasi dan kemitraan antara insan pers dengan instansi pemerintah, sehingga informasi mengenai kebijakan dan pelayanan publik dapat tersampaikan secara benar, utuh, dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Hartono)

Terima Kunjungan Danrem ..... *Halaman 1*

"Kita ingin menjadikan Padang Panjang bukan lagi sekadar daerah yang dilintasi, melainkan kota tujuan utama. Kita ingin menciptakan lingkungan yang teratur, bersih, aman, dan nyaman, sehingga setiap orang yang datang merasa betah dan terkesan," tambahnya.

Sementara itu, Brigjen Aji Mimbarno menyambut baik upaya memperkuat sinergi tersebut. Ia mengatakan, kunjungan itu selain untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, juga menjadi kesempatan membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Daerah.

Dalam suasana akrab, Aji turut berbagi cerita mengenai latar belakang keluarganya. Ia berasal dari Jawa Tengah, sementara istrinya merupakan putri daerah Sumatera Barat asal Kabupaten Limapuluh Kota.

Aji juga memaparkan sejumlah program dan potensi TNI AD yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Daerah, salah satunya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menjelaskan, TNI AD memiliki program pembangunan 5.000 jembatan di seluruh Indonesia, dengan sekitar 3.000 jembatan disebut telah terealisasi. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0307/Tanah Datar, Letkol Arm Hendriyana; Wakil Wali Kota Allex Saputra; Sekretaris Daerah Kota Doni Hendra; unsur Forkopimda; serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang.

(Zakirman)

Wali Kota dan Ketua TP-PKK Padang Panjang..... *Halaman 1*

dayaan perempuan dan keluarga.

Eka Arismana menyampaikan, penghargaan kepada Hendri Arnis diberikan atas kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang dinilai visioner dan berorientasi pada kinerja.

Hendri menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, capaian tersebut bukan semata-mata keberhasilan pribadi, melainkan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang, dukungan berbagai pihak, dan partisipasi masyarakat.

Hendri menegaskan, digitalisasi ekonomi, inovasi infrastruktur perkotaan, dan akuntabilitas pelayanan publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu memperluas peluang ekonomi masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga. Ia juga mengapresiasi seluruh aparatur Pemerintah dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang Panjang.

Hendri menekankan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat nyata kebijakan dan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang kemajuan daerah.

Sementara itu, Maria juga mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya dalam bidang aktivasi ekonomi kreatif, pengasuhan anak usia dini, dan pengembangan literasi perkotaan.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi kreatif, pengasuhan anak usia dini, dan peningkatan literasi merupakan aspek penting dalam membangun keluarga berkualitas sekaligus mempersiapkan generasi masa depan.

Melalui berbagai program pemberdayaan, TP-PKK diharapkan terus menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas perempuan, mendorong kemandirian ekonomi keluarga, memperkuat pemahaman orang tua tentang pengasuhan anak, serta menumbuhkan budaya literasi sejak usia dini.

Penghargaan dalam ajang ILMA 2026 ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang Panjang, TP-PKK, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat inovasi daerah, dan mengembangkan program pemberdayaan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. **(Zakirman)**

100 Hari Kerja Kades Bilo Moh. Nasir: Perkuat Keamanan, Rangkul Pemuda, dan Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan

Tolitoli, Jaya Pos

Mengawali kepemimpinannya sebagai Kepala Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, periode 2026–2031, Moh. Nasir menyiapkan sejumlah program prioritas dalam 100 hari kerja. Fokusnya meliputi penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pembinaan generasi muda, pengembangan kehidupan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menggelar program Jumat Keliling dengan mengunjungi masjid-masjid di wilayah Desa Bilo. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi warga, sekaligus membahas persoalan sosial dan keamanan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian.

"Melalui Jumat Keliling, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi warga, dan mencari solusi bersama," ujar Moh. Nasir.

Dalam menjaga kamtibmas, pemerintah desa juga berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri apabila menemukan aktivitas mencurigakan, tetapi segera melaporkannya kepada pemerintah desa atau kepolisian.

Kepala Desa Bilo, Moh. Nasir. (Foto/Hariyanti)

Selain itu, pembinaan generasi muda menjadi perhatian khusus. Moh. Nasir ingin mengarahkan pemuda agar aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, olahraga, dan aktivitas positif lainnya guna mencegah kenakalan remaja.

Di bidang keagamaan, ia juga berupaya memperjuangkan pembangunan pesantren sebagai sarana pendidikan dan pembinaan moral generasi muda. Sementara itu, kesejahteraan nelayan menjadi agenda lain yang akan didorong melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, dan instansi terkait.

Sebelum menjabat kepala desa, Moh. Nasir pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ogodeide. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam membangun komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan Desa Bilo tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga.

Melalui program 100 hari kerja tersebut, Moh. Nasir berharap Desa Bilo semakin aman, religius, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. **(Hariyanti)**

Danramil 11/GSB Hadiri Rakerda Taman Siswa 2026, Guru Terima Penghargaan Satya Karti

Simalungun, Jaya Pos

Danramil 11/GSB Kodim 0207/Simalungun, Kapten Inf P. Sitorus, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Taman Siswa SUBARIA XXVIII Tahun 2026 di Conventions Hall, Kelurahan Tiga Raja, Kamis (29/10/2026). Kehadirannya mewakili Dandim 0207/Simalungun sebagai bentuk dukungan TNI terhadap kemajuan pendidikan dan penguatan nilai kebangsaan.

Kodim 0207 /Simalugun,Dukung Kemajuan Pendidikan, Danramil 11/ Girsang Sipangan Bolon hadir. (Foto/Rd)

Rakerda tersebut menjadi forum bagi keluarga besar Taman Siswa untuk mengevaluasi program kerja, memperkuat koordinasi, dan menyusun langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat pembentukan generasi muda yang berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan, serta menjunjung tinggi semangat cinta tanah air.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan menyanyikan Himne Taman Siswa. Agenda kemudian dilanjutkan dengan laporan ketua panitia, sambutan pembimbing daerah, sambutan Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, serta arahan Wali Kota Pematangsiantar.

Salah satu agenda penting dalam Rakerda tersebut adalah penyerahan penghargaan Satya Karti kepada sejumlah guru. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam memajukan dunia pendidikan.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh tamu undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Danramil 11/GSB Kapten Inf P. Sitorus, serta Kapolsek Parapat AKP M. Pandiangan, S.H., yang mewakili Kapolres Simalungun.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar, perwakilan pengurus SUBARIA, Ketua Perguruan Cabang SUBARIA, Penghubung Daerah Wanita Taman Siswa, serta para guru SUBARIA.

Kehadiran unsur TNI, pemerintah daerah, dan insan pendidikan dalam kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Melalui Rakerda ini, Taman Siswa diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang terarah dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat nilai-nilai luhur kebangsaan bagi generasi penerus.

Kodim 0207/Simalungun melalui jajaran Koramil juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan positif di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. **(Rd)**

Kapolres Maros Ngobrol Santai Bersama Warga Mandai, Serap Aspirasi dan Bahas Kamtibmas

Maros, Jaya Pos

Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., berkumpul bersama masyarakat, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Suasana santai dan penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut. Sambil berbincang dan menikmati kopi bersama, Kapolres Maros mendengarkan aspirasi warga serta bertukar pikiran mengenai kondisi keamanan dan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat.

Kapolres Maros bahas Kamtibmas Bersama warga Mandai.(Foto/Erik)

Kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi yang lebih dekat antara Polri dan masyarakat. Melalui pertemuan seperti ini, warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan secara langsung sekaligus memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan.

AKBP Devi Sujana mengatakan, peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Karena itu, komunikasi dan kebersamaan perlu terus dibangun agar berbagai persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat dan kalangan pemuda untuk terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat. Komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Mandai.

Kebersamaan tersebut mencerminkan semangat Polisi Bersama Masyarakat, bahwa menjaga keamanan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling menyapa, mendengarkan, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar.**(Hk)**

DPRD Kabupaten Pasuruan dan Pemkab Sepakati Perubahan SOTK, Dinas Pemadam Kebakaran Resmi Berdiri Sendiri

Pasuruan, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (28/10/26).

Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam penataan kelembagaan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa pembahasan perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penataan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penataan tersebut terutama menyasar bidang penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, pemadam kebakaran, serta penyelamatan. Melalui perubahan SOTK tersebut, terdapat tiga poin strategis yang menjadi perhatian utama.

Pertama, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sebelumnya berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dipisahkan menjadi perangkat daerah tersendiri dengan tipe C.

Pembentukan dinas khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons terhadap kejadian kebakaran maupun kondisi darurat lainnya, sekaligus mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan SOTK Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran. (Foto :Jaya Pos)

Kedua, penataan tugas Satpol PP. Dengan pemisahan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan, Satpol PP akan lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.

Penataan ini diharapkan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah semakin terarah sesuai kewenangannya.

Ketiga, penyesuaian kelembagaan BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan disesuaikan kelembagaannya sebagai perangkat daerah tipe A dalam kerangka Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyesuaian tersebut mengacu pada terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.

Dengan struktur organisasi yang lebih fokus dan terintegrasi, Pemkab Pasuruan berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga, dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

Setelah memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna, draf Raperda yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi akan dikirimkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh nomor register.

Dengan demikian, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. **(Wio)**

Camat Sepatan Aan Ansori Gelar Bazar Sembako Murah

Aan Ansori,Sip ,M.Si Camat Sepatan Dalam Rangka Bazar Murah. (Foto/Abdullah)

Tangerang, Jaya Pos

Pemerintah Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, menggelar Bazar Sembako Murah, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Bazar tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga terlihat gembira karena program ini dinilai dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Camat Sepatan, Aan Ansori, S.IP., M.Si., saat ditemui awak media Jaya Pos menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang atas dukungan sehingga kegiatan bazar sembako murah dapat terlaksana di wilayah Kecamatan Sepatan.

Menurutnya, kegiatan bazar sembako murah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ekonomis.

Aan Ansori berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. Semoga sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kecamatan Sepatan semakin kuat dalam menghadirkan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Pemerintah Kecamatan Sepatan juga menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada salah seorang warga sebagai bagian dari pelaksanaan program bazar murah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Sepatan berharap dapat terus memberikan pelayanan dan menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga. **(Abd)**

Ikuti 46 Cabor Di Porprov XV Jabar

Bupati Dorong Atlet KabupatenSukabumi Tampil Maksimal Dan Sportif

Bupati Sukabumi H.Asep Japar Dalam Acara Pelepasan Atlet Porprov Jabar (Foto/Hms)

Sukabumi, Jayapos

Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengukuhkan sekaligus melepas para atlet dari puluhan cabor yang akan berlangsung di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat tahun 2026 di GOR Cisaat, Senin, 26 Oktober 2026. Porprov XV Jawa Barat direncanakan berlangsung sejak 7-20 November 2026. Bekasi menjadi tuan rumah bersama yang didampingi Depok dan Bogor.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Sukabumi mengikuti sekitar 46 cabor. Daerah terluas se Jawa Barat ini menargetkan masuk 10 besar.

Dilihat dari target tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mendorong para atlet untuk mengoptimalkan diri dalam setiap pertandingan. Hal itu tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

"Berkompetisilah secara sehat dan Sportif. Mari raih prestasi terbaik yang membanggakan daerah," ujarnya

Maka dari itu, bupati berpesan agar para atlet menjaga kesehatan dan kondisi fisik secara baik. Termasuk harus mempersiapkan mental sebaik-baiknya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri, berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan olahraga. Hal itu sebagaii bagian dari pembangunan SDM Kabupaten Sukabumi.Apalagi, sejalan dengan visi Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).

"Olahraga adalah instrumen strategis dalam membentuk generasi yang sehat, produktif, berprestasi, dan memiliki daya saing. Mari kita sama sama berjuang untuk meriah prestasi," pungkasnya.**(YUD)**

MARI BERSAMA PERANGI NARKOBA

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

JAPOS.CO
Email:japos@yahoo.com
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 864 TAHUN XX, 2 - 8 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Museum Perjalanan Pemilu Jadi Sarana Edukasi Demokrasi bagi Pemilih Pemula

Jakarta, Jaya Pos

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, membuka kegiatan peningkatan kapabilitas demokrasi yang diikuti sekitar 80 pelajar SMA dan SMK se-Jakarta Timur di Kantor Sekretariat KPU Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pemilih pemula untuk mengenal lebih dekat Museum Perjalanan Pemilu, yang menyajikan perjalanan sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa ke masa.

Melalui kunjungan tersebut, para pelajar diajak memahami perkembangan sistem demokrasi di Tanah Air, termasuk perubahan regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu seiring perkembangan zaman.

Salah satu peserta, Dzakwan Mahib, siswa SMAN 36 Jakarta, mengaku mendapatkan wawasan baru setelah melihat langsung berbagai dokumentasi sejarah pemilu. Menurutnya, pemahaman mengenai perjalanan pemilu menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk ikut mendorong pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Antusiasme serupa disampaikan Abdilah dari SMK Angkasa I Halim Perdanakusuma Jakarta dan M. Umar Karim dari SMAN 14 Jakarta. Keduanya mengaku senang dapat melihat secara langsung berbagai rekam jejak sejarah pemilu melalui koleksi dan penyajian informasi di museum tersebut.

"Kita jadi lebih terbuka pikirannya. Pemilu itu berjalan sangat lama dan mengalami banyak perubahan. Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan dan pelajari dari perubahan-perubahan tersebut, sehingga ke depannya bisa menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas pemilu," ungkap Dzakwan.

Museum Perjalanan Pemilu menjadi salah satu sarana edukasi untuk mengenalkan sejarah demokrasi Indonesia, mulai dari penyelenggaraan pemilu pertama pada 1955 hingga perkembangan pemilu di era modern yang memanfaatkan teknologi informasi.

Keberadaan museum ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami pentingnya pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Melalui berbagai artefak, dokumentasi, dan narasi visual, pengunjung dapat mempelajari dinamika penyelengga-

▸▸Halaman 11

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, membuka kegiatan peningkatan kapabilitas demokrasi yang diikuti sekitar 80 pelajar SMA dan SMK se-Jakarta Timur di Kantor Sekretariat KPU Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kamis (29/10/2026).(Foto Humas walikota)

Dukung Akses Menuju Kawasan Industri Ngoro

Pelebaran Jalan Kutogirang–Wotanmas Jedong Senilai Rp2,27 Miliar Dikerjakan

Mojokerto, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Salah satu proyek yang saat ini dikerjakan adalah pelebaran jalan menuju standar pada ruas Kutogirang–Wotanmas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

▸▸ Halaman 11

Pembangunan proyek ruas jalan Kutogirang-Wotanmas Jedong. (Foto: dok Ad)

Usai Dilantik, Kades Muarah Rusddin Fokus Pelayanan, Air Bersih hingga Pemberdayaan Petani

Tolitoli, Jaya Pos

Usai resmi dilantik pada 13 Oktober 2026, Kepala Desa Muarah, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Rusddin, mulai mempersiapkan sejumlah program prioritas untuk mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatiannya antara lain pembenahan pelayanan administrasi pemerintahan desa, peningkatan penerangan lampu jalan, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemberdayaan

▸▸ Halaman 11

Kades Muarah, Rusddin. (Foto/Hariayanti)

Pengurus Keluhkan Koperasi Merah Putih Belum Beroperasi, DPRD Langkat Siap Fasilitasi

Langkat, Jaya Pos

Sejumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Langkat mengadukan berbagai persoalan terkait belum beroperasinya koperasi kepada DPRD Kabupaten Langkat. Mereka menyoroti kejelasan kewenangan pengurus, peran manajer, hingga kebutuhan biaya operasional yang selama ini masih ditanggung secara pribadi.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).

Dalam pertemuan itu, para pengurus mengungkapkan keresahan karena operasional koperasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mereka menilai kewenangan pengurus dalam mengelola koperasi belum jelas, terutama jika dibandingkan dengan manajer KDKMP yang direkrut oleh pemerintah pusat.

"Di Kabupaten Langkat ada 277 Koperasi Merah Putih, tetapi sampai saat ini sudah satu setelah tahun belum beroperasi," ujar Eddy, salah seorang pengurus ko-

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin terima audiensi pengurus KDKMP Langka. (foto/ Humas DPRD Langkat)

perasi.

Selain persoalan operasional, para pengurus juga mempertanyakan pembagian kewenangan antara pengurus dan manajer dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Menurut mereka, kewenangan untuk membeli produk yang akan dijual melalui koperasi berada di tangan manajer, sehingga ruang keterlibatan pengurus dalam pengambilan keputusan dinilai terbatas.

Mereka juga menyoroti mekanisme pelaporan pengelolaan usaha kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk terkait keuntungan yang diperoleh koperasi.

"Manajer melaporkan berbagai hal kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk laba. Lalu, bagaimana dengan posisi kami sebagai pengurus? Dalam konsep koperasi ada sisa hasil usaha (SHU). Bagaimana nanti kami menjelaskan kepada anggota jika kewena-

▸▸ Halaman 11

Tinjau Pelatihan Tenaga Linting Tembakau, Kapolres Trenggalek Kunjungi PR Alfi Putra

Trenggalek, Jaya Pos

Meninjau langsung kepelatihan bagi tenaga kerja linting tembakau, Kapolres Trenggalek beserta jajaran kunjungi PR Alfi Putra di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan.

Didampingi sejumlah pejabat utama, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, mendatangi perusahaan lokal tersebut pada Kamis 29 Oktober 2026.

Selain untuk melihat secara langsung proses pelatihan, disempatkan pula menyapa dan berbincang dengan para karyawan. Baik pihak staf manajemen maupun pegawai lain yang kebetulan sedang bekerja.

Termasuk pula, mengecek ruang linting tembakau, gudang penyimpanan hingga proses pengepakan. "Ini merupakan tindak lanjut dari program Kapolri dan Kapolda Jatim yakni Poliran (Polisi peduli pengangguran dan ketenagakerjaan). Berkunjung sekaligus meninjau untuk melihat langsung kondisi pelatihan ketenagakerjaan. Terutama dalam menampung masyarakat yang ingin bekerja di pabrik rokok," ujar Kapolres.

Menurut dia, dengan turun

Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya turut mencoba melinting tembakau di PR Alfi Putra, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan. (Foto: ist)

langsung ke lapangan akan bisa diketahui kondisi riil yang ada. Termasuk, ketika ada kendala, hambatan maupun potensi penggunaan tenaga kerja di sektor pengolahan tembakau. Sehingga dapat membantu memberikan solusi terbaik saat di perlukan.

Sekaligus untuk mendorong terciptanya peluang lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran.

"Ada 25 orang yang di fasilitasi ikut pelatihan melinting tembakau selama 10 hari. Setelah itu, akan direkrut langsung sebagai karyawan linting," kata AKBP Rizky.

Dijelaskan olehnya, kegiatan yang tergelar merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab, Polres

▸▸ Halaman 11

Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked (Foto Humas Pemkab). (foto: ist)

Bupati Way Kanan: Akreditasi RSUD ZAPA Jangan Sekadar Kejar Predikat, Mutu Layanan Harus Dibuktikan

Way Kanan, Jaya Pos

Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked menegaskan survei akreditasi RSUD Zainal Abidin Pagar Alam (ZAPA) tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi ajang pemenuhan dokumen dan persyaratan administratif. Hasil akreditasi harus dibuktikan melalui peningkatan mutu pelayanan, profesionalisme tenaga kesehatan, dan keselamatan pasien.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan Survei Akreditasi RSUD ZAPA, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, akreditasi merupakan momentum untuk mengukur sekaligus memperkuat komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Tim Survei Akreditasi, dr. Nina Virginawati, MHSM., dan dr. Diah Anjarini, M.Epid., beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Direktur RSUD ZAPA, serta seluruh civitas hospitalia rumah sakit.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD ZAPA, dan seluruh jajaran rumah sakit yang telah mempersiapkan berbagai as-

▸▸Halaman 11

Polres Maros Gelar Upacara Sumpah Pemuda,

Kapolres Ajak Pemuda Tingkatkan Empati kepada Sesama

Kapolres Maros Devi Sujana Dalam Upacara Sumpah Pemuda. (Foto/Eril)

Maros, Jaya Pos

Polres Maros menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat semangat persatuan, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong generasi muda agar berperan aktif dalam membangun bangsa.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan pemuda tidak hanya diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nilai persatuan, gotong royong, dan empati terhadap sesama perlu terus ditanamkan di tengah tantangan kehidupan modern.

Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., mengajak seluruh generasi muda, khususnya di Kabupaten Maros, untuk menjadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai dorongan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, serta harmonis. Semangat kepemudaan harus tercermin melalui perilaku positif, sikap saling menghargai, serta kesediaan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam menjaga diri dari pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, aksi geng motor, tawuran, dan berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Generasi muda diharapkan mampu mengembangkan potensi melalui pendidikan, kegiatan sosial, olahraga, serta aktivitas positif lainnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 ini diharapkan semakin memperkuat semangat kebangsaan dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda. Sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, Polres Maros mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan penuh rasa persaudaraan.

Dengan semangat persatuan dan empati, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.**(Hk)**

Hari Sumpah Pemuda

Bupati Belitung Serahkan Penghargaan Lomba Pengelolaan Arsip OPD Terbaik 2026

Belitung, Jaya Pos

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mendorong peningkatan disiplin dan profesionalisme pengelolaan arsip di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Pengelolaan Arsip OPD Terbaik Tingkat Kabupaten Belitung Tahun 2026.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, di halaman Kantor Bupati Belitung, Tanjungpandan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Belitung Syamsir, S.I.Kom., Sekretaris Daerah Marzuki, S.IP., serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Hendri Suzanto, S.Sos., M.M.Tr.

Bupati Djoni Alamsyah Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah berpartisipasi dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.

Menurutnya, pengelolaan arsip secara tertib, sistematis, dan profesional merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Arsip juga menjadi dokumen penting yang harus dijaga keberadaan serta keasliannya karena berkaitan dengan administrasi dan memori kelembagaan pemerintah daerah.

Secara khusus, Bupati memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang berhasil meraih Juara I.

Bupati Belitung saat menyerahkan Penghargaan Lomba Pengelolaan Arsip OPD Terbaik 2026. (Foto: Yustami)

Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam membangun budaya tertib arsip.

"Disiplin dalam menjaga dan mengelola arsip merupakan kewajiban setiap OPD. Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Bagi para pemenang, saya berharap prestasi ini terus dipertahankan dan dapat menjadi teladan bagi OPD lainnya," ujar Bupati.

Adapun hasil Lomba Pengelolaan Arsip OPD Terbaik Tingkat Kabupaten Belitung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:Juara I: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.Juara II: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Juara III: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Juara IV: Kecamatan Sijuk.

Bupati berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi atas prestasi, tetapi juga mampu memotivasi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan kualitas pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Momentum Hari Sumpah Pemuda, lanjutnya, juga harus menjadi pengingat bahwa semangat tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme perlu diwujudkan melalui kerja nyata dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dengan demikian, budaya tertib arsip diharapkan semakin kuat dan merata di seluruh OPD Kabupaten Belitung sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Dinas Dikbud Pertahankan Prestasi Juara I

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tomi Wardiansyah, S.Sos., saat dihubungi JAPOS.CO di ruang kerjanya, Jumat (30/10/2026), mengaku senang dan bangga atas penghargaan yang kembali diraih instansinya.

Ia mengatakan, keberhasilan mempertahankan posisi Juara I merupakan hasil komitmen dan kedisiplinan seluruh jajaran dalam menjaga serta menata arsip, khususnya dokumen administrasi dan surat-surat penting.

Menurut Tomi, pengelolaan arsip tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan administratif biasa. Setiap dokumen harus disimpan secara rapi, sistematis, dan ditempatkan sesuai klasifikasinya agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan.

"Bagi kami, menjaga arsip merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara konsisten. Administrasi harus tertata dengan baik, termasuk penempatan surat-surat penting yang tidak boleh hilang sebelum masa retensinya berakhir," ungkap Tomi.

(Yustami)

Bantu Warga, DCKTR Tangsel Salurkan 336 Ribu Liter Air Bersih hingga Oktober

Penyalurkan 336.000 liter air bersih oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan. (Foto/Dok Jaya Pos)

Tangerang Selatan, Jaya Pos

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyalurkan 336.000 liter air bersih hingga 13 Oktober 2026. Distribusi dilakukan ke sejumlah wilayah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di lokasi yang membutuhkan tambahan pasokan air bersih. Jumat 23/10/2026)

Berdasarkan laporan distribusi air bersih periode Juli hingga Oktober 2026, kegiatan penyaluran menjangkau sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Setu dan Serpong. Beberapa lokasi yang tercatat meliputi Kelurahan Keranggan, Kademangan, Babakan, Bakti Jaya, Buaran, serta Cipeucang.

Sekretaris Dinas (Sekdis) DCKTR Kota Tangsel, Budi Rachmat mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah daerah.

"Distribusi air bersih ini merupakan upaya membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami berupaya agar pelayanan dapat menjangkau wilayah yang memerlukan bantuan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Pendataan wilayah penerima menjadi salah satu bagian penting agar penyaluran air bersih dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam laporan kegiatan, distribusi air bersih tercatat berlangsung berulang di sejumlah lokasi. Pada September, penyaluran antara lain dilakukan di Keranggan dan Kademangan, sedangkan pada Oktober distribusi menjangkau Buaran, Bakti Jaya, Babakan, serta sejumlah wilayah di Kecamatan Setu dan Serpong.

Sementara itu, Kepala Subbagian UPTD Pemgelolaan Air Limbah Domestik dan Pemyediaan Air Minum DCKTR Tangsel Emon Suryaman , menjelaskan bahwa berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan, total volume air bersih yang telah didistribusikan hingga 13 Oktober 2026 mencapai 336.000 liter.

"Berdasarkan data rekapitulasi hingga 13 Oktober 2026, jumlah air bersih yang telah disalurkan mencapai 336.000 liter," katanya.

Menurutnya pencatatan kegiatan distribusi diperlukan untuk mendokumentasikan tanggal pelaksanaan dan wilayah yang menerima penyaluran. Data tersebut juga menjadi bahan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan air bersih di lapangan.

Pada Oktober 2026, laporan mencatat distribusi pada 2 Oktober di Buaran, 5 Oktober di Bakti Jaya dan Babakan, serta 6 Oktober di Buaran, Serpong, dan Setu. Penyaluran berlanjut pada 7 dan 8 Oktober di wilayah Babakan, Kecamatan Setu, serta sejumlah titik di Kecamatan Setu dan Serpong.

Distribusi juga tercatat pada 12 Oktober di RT 01/01, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, dan 13 Oktober di RT 02/04, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari laporan penyaluran air bersih hingga pertengahan Oktober 2026.

Melalui kegiatan ini, DCKTR Kota Tangsel berupaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat pendataan dan koordinasi agar pelayanan distribusi dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan sesuai kondisi di lapangan.

(ADV)

Kades Mashorin Siapkan Program Prioritas Desa Batuilo, Fokus Infrastruktur, Air Bersih dan Penerangan Jalan

Tolitoli, Jaya Pos

Usai resmi dilantik sebagai Kepala Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Mashorin, S.Sos., mulai mempersiapkan sejumlah program prioritas untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian utama dalam kepemimpinannya meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemasangan lampu penerangan jalan, termasuk di lorong-lorong permukiman warga yang selama ini masih membutuhkan fasilitas penerangan.

Mashorin mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari visi dan misinya dalam membangun Desa Batuilo agar semakin maju, berkembang, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, seluruh program pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan desa.

Ia menjelaskan, pada 2027 mendatang, pemasangan lampu penerangan jalan akan menjadi salah satu program yang diprioritaskan apabila kondisi Dana Desa memungkinkan untuk dialokasikan.

Sebagai langkah awal, dirinya bersama bagian perencanaan dan program desa telah melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah ruas jalan dan lorong permukiman yang dinilai membutuhkan pemasangan lampu penerangan.

Program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hari. Selain menunjang aktivitas warga, penerangan jalan juga diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan serta menciptakan lingkungan desa yang lebih tertata.

Air Bersih Menjadi Perhatian Serius

Selain infrastruktur dan penerangan jalan, penyediaan sarana air bersih juga menjadi salah satu perhatian serius Mashorin. Ia menilai, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan.

Mashorin S. Sos, Kades Batuilo. (Foto/Hariyanti)

Mashorin menyadari bahwa pembangunan sarana air bersih membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi lintas pemerintahan. Karena itu, apabila kemampuan keuangan desa belum mencukupi untuk merealisasikan pembangunan secara menyeluruh, pihaknya akan berupaya mengusulkan program tersebut kepada instansi terkait.

Koordinasi akan dilakukan dengan dinas teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan instansi yang membidangi pengairan, serta pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi.

"Saya sangat berharap adanya dukungan dari dinas terkait, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi agar kebutuhan air bersih masyarakat Desa Batuilo dapat terpenuhi. Ini merupakan salah satu program yang ingin saya perjuangkan," tegasnya.

Disiplin Aparatur Desa dan Peningkatan Pelayanan

Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Mashorin juga menaruh perhatian terhadap peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa.

Ia telah menginstruksikan seluruh perangkat desa agar menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku. Aparatur desa diharapkan hadir dan memberikan pelayanan secara optimal serta tidak meninggalkan kantor sebelum waktunya.

Mashorin menegaskan bahwa kedisiplinan perangkat desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kantor desa harus selalu berfungsi sebagaimana mestinya agar masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dengan mudah, tertib, dan tepat waktu.

Menurutnya, pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap perangkat desa harus memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugasnya.

Ajak Masyarakat Bersatu Membangun Desa

Mashorin menegaskan bahwa visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat bukan sekadar janji, melainkan menjadi tanggung jawab yang harus diperjuangkan dan direalisasikan selama masa kepemimpinannya.

Dengan sejumlah program prioritas tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.

(Hariyanti)

Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas

Satlantas Polres Maros Lakukan Penindakan Ke Pengendara yang Melanggar

Lalu Lintas polres Maros Dalam Operasi Patuh Pallawa. (Foto/Eril)

Maros, Jaya Pos

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Maros melakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dalam pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026. Penindakan ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat serta mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Sejumlah pelanggaran menjadi perhatian petugas, di antaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang tidak melengkapi persyaratan berkendara, serta pelanggaran lain yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Maros, Iptu Suwardi, mengatakan bahwa penindakan dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

"Penindakan ini bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun mobil, agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," ujarnya, Kamis (29/10/2026).

Melalui Operasi Patuh Pallawa 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026, Satlantas Polres Maros berharap tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat dan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.

Polres Maros mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan, menghormati sesama pengguna jalan, dan menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai tanggung jawab bersama.**(Hk)**

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-98

Bupati Maesyal Dorong Peran dan Kontribusi Generasi Muda dalam Pembangunan

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat pimpin upacara hari Sumpah Pemuda. (Goto/Guns)

Tangerang, Jaya Pos

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tingkat Kabupaten Tangerang di Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Puspemkab Tangerang, Rabu (28/10/2026).

Dalam amanatnya, Bupati Maesyal mengajak para pemuda untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa.

"Kalau dahulu para pemuda bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan, sekarang tugas kita adalah menjaga persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang dan Indonesia menjadi lebih baik," ujar Bupati Maesyal.

Maesyal menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Tangerang. Untuk itu, potensi pemuda perlu terus dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, teknologi, olahraga, serta seni dan budaya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat persatuan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Menpora juga menyampaikan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik dan teknologi, tetapi juga oleh karakter, kecintaan terhadap tanah air, serta kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang kepada mahasiswa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap akses pendidikan tinggi, dengan prioritas bagi masyarakat yang berada pada desil 1-4.

Salah satu penerima beasiswa, Cahaya Adelia, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Tangerang, mengaku bersyukur dapat lolos seleksi program tersebut. Ia mengatakan proses seleksi, mulai dari wawancara hingga tes akademik, dapat dilalui dengan baik berkat bimbingan dan pendampingan dari pihak penyelenggara beasiswa.

Cahaya mengatakan kedua orang tuanya yang bekerja sebagai buruh sangat mendukung keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurutnya, beasiswa tersebut menjadi kesempatan berharga untuk meraih cita-cita meski berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

(GUNS)

Sosialisasikan Perda Jamsostek, Pj. Sekda Trenggalek Tegaskan Beberapa Hal

Penjabat (Pj) Sekda Trenggalek, ST. Triadi Admono serahkan bantuan kepada salah satu ahli waris penerima jamsostek di Pendopo Manggala Praja Nugraha.

Trenggalek, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek sosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Mengambil tempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha, kegiatan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Sekda Trenggalek, ST. Triadi Admono.

Disampaikan olehnya, bahwa hal yang paling ditakutkan seorang pekerja itu bukanlah tentang sekedar beban kerja semata. Melainkan, ketika jatuh sakit atau saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghasilan keluarga mereka berhenti seketika.

"Satu musibah saja bisa sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam keluarga. Yang sebelumnya mandiri akan berpotensi menjadi keluarga rentan," sebut Triadi, Selasa 27 Oktober 2026.

Untuk itulah, masih kata dia, penerbitan Perda tersebut merupakan bagian dari bentuk kehadiran negara bagi warganya. Terutama, sebagai upaya mitigasi atas kekhawatiran para pekerja. Sekaligus, demi memberikan perlindungan sosial (bagi pekerja) melalui komitmen UCJ (Universal Coverage Jamsostek). Khususnya pada Indikator Kinerja Daerah sebagai 'indicator imperative'.

"Pun begitu, meski daerah punya peran krusial untuk implementasinya nanti akan tetap dikawal oleh Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Ditambahkan Pj. Sekda, dalam beberapa klausul Perda dimaksud, ada sejumlah poin penting yang diatur. Seperti, memperhatikan kelompok pekerja rentan sehingga harus mendapatkan perlindungan prioritas.

Dengan mempertimbangkan kondisi gender, usia, disabilitas, penghasilan dan data sosial ekonomi.

Sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminas sosial dan telah dijabarkan dalam berbagai regulasi.

"Semua tahu, kemampuan fiskal kita terbatas. Tidak mungkin seluruh iuran pekerja rentan di bayarkan hanya dari APBD. Namun, apakah akan berhenti pada keterbatasan itu. Tentu tidak, justru di sinilah tantangannya agar mampu berinovasi. Sebagai alternatif, menggandeng dunia usaha lewat dana tanggung jawab sosial perusahaan," jelas Triadi.

Solusi lain, lanjutnya, berkolaborasi dengan lembaga zakat dan filantropi. Kemudian, melibatkan pemerintah desa ataupun mengajak gotong royong warga. Bangun data secara akurat supaya bantuan tepat sasaran, manfaatkan teknologi agar pendaftaran semakin mudah, cepat, dan murah.

Memang, ditiap kebijakan pasti akan memunculkan sisi positif serta negatif. Tidak mungkin pula seluruh resiko mampu dihilangkan. Tetapi, semampunya kemungkinan buruk dapat diminimalisir.

"Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti tetapi jadi pemicu agar mampu berpikir lebih kreatif. Bersama kita buktikan bahwa daerah dengan anggaran terbatas pun bisa melangkah jauh. Dengan tetap memohon ridha Allah, sosialisasi ini tidak berhenti di ruangan ini tetapi berlanjut menjadi gerakan bersama. Mari bekerja dengan gagasan, data dan hati," harap mantan Kasatpol PPK Trenggalek itu.

(HWi)

Pimpin Kontingen Maros ke Porprov Sulsel 2026, Kapolres Siap Kawal Perjuangan Atlet Raih Prestasi

Kapolres Maros Devi Sujana Pimpin Kontingen (Porprov) Sul-Sel. (Foto/Erik)

Maros, Jaya Pos

Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., dikukuhkan sebagai Ketua Kontingen Kabupaten Maros untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan Tahun 2026, pengukuhan tersebut digelar dalam acara pengukuhan kontingen Kabupaten Maros di taman Kota Turikale Kabupaten Maros, Rabu (28/10/2026).

Amanah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan solidditas seluruh elemen kontingen demi mengharumkan nama Kabupaten Maros di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi kontingen Maros yang tengah mematangkan persiapan menjelang Porprov Sulsel XVIII yang dijadwalkan berlangsung pada 7–14 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo.

Kedua daerah tersebut menjadi tuan rumah bersama dengan lokasi pertandingan yang tersebar sesuai cabang olahraga yang dipertandingkan. Sebagai Ketua Kontingen, Kapolres Maros diharapkan dapat mendorong sinergi antara atlet, pelatih, ofisial, pengurus KONI, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat.

Persiapan yang terkoordinasi dinilai penting agar para atlet dapat berkompetisi secara maksimal, menjaga sportivitas, serta membawa nama baik daerah selama mengikuti pertandingan.

Kabupaten Maros sendiri memasang target bersaing di papan atas klasemen perolehan medali. Sejumlah cabang olahraga seperti panahan, kempo, atletik, tinju, bridge, karate, dan akuatik menjadi andalan untuk mendulang prestasi. Rencannya Kabupaten Maros mengikuti 33 cabang olahraga dari total 45 cabang yang dipertandingkan.

Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menempatkan amanah sebagai Ketua Kontingen sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama, disiplin, dan semangat juang seluruh anggota kontingen. Dukungan terhadap atlet tidak hanya berkaitan dengan kesiapan menghadapi pertandingan, tetapi juga memastikan seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik Kabupaten Maros.

Porprov merupakan wadah pembinaan atlet daerah sekaligus kesempatan menunjukkan potensi olahraga yang dimiliki Kabupaten Maros. Melalui kompetisi ini, para atlet diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan membuka peluang untuk melangkah ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan berbagai pihak, kontingen Kabupaten Maros diharapkan mampu tampil kompetitif pada Porprov Sulsel XVIII Tahun 2026. Pengukuhan Kapolres Maros sebagai Ketua Kontingen menjadi salah satu momentum untuk memperkuat kebersamaan dan membangun optimisme dalam perjuangan membawa pulang prestasi bagi daerah.**(Hk)**

BI Sulsel Dorong Digitalisasi Pajak MBLB, Bapenda Maros Ikut FGD

Syamsuar, Agus dan Rosmiati dalam acara di Cabang Bank Indonesia Makassar. (Foto/Harjan)

Maros, Jaya Pos

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) melalui Digitalisasi Sistem Pembayaran."

FGD tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapenda Kabupaten Maros, Bapenda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), serta Bank Sulselbar.

Dari Bapenda Kabupaten Maros, kegiatan FGD tersebut diwakili tiga pejabat, yakni Syamsuar selaku Kabid Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Rosmiati selaku Kabid Perencanaan Pendapatan Daerah, dan Agus Ramdan selaku Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Kehadiran jajaran Bapenda Maros tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan sistem informasi, mekanisme pembayaran, hingga optimalisasi penerimaan Pajak MBLB.

Dalam dokumen Term of Reference (TOR) Bank Indonesia Sulsel, Pajak MBLB disebut menjadi salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di wilayah dengan aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Optimalisasi penerimaan pajak tersebut membutuhkan tata kelola yang efektif, mulai dari pendataan wajib pajak dan objek pajak, penghitungan serta penetapan pajak terutang, penerbitan tagihan atau kode bayar, pembayaran, hingga pencatatan penerimaan dan pelaporan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan kanal pembayaran, proses pembayaran yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, integrasi data antara pemerintah daerah dan perbankan, serta proses rekonsiliasi transaksi.

Melalui FGD ini, Bank Indonesia mendorong adanya identifikasi terhadap berbagai kendala tersebut sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Bapenda Maros Diminta Siapkan Data

Dalam FGD tersebut, Bapenda Kabupaten Maros dan Pangkep diminta menyiapkan sejumlah data terkait Pajak MBLB.

Data yang diperlukan meliputi target dan realisasi Pajak MBLB tahun 2025 dan 2026, data wajib pajak aktif, objek pajak, serta potensi penerimaan MBLB.

Selain itu, Bapenda juga diminta menyampaikan proses bisnis pemungutan dan pembayaran yang berjalan, kanal pembayaran yang tersedia dan tingkat pemanfaatannya.

Sementara Bank Sulselbar akan memberikan informasi mengenai kanal pembayaran pajak MBLB yang telah tersedia, mekanisme penerimaan dan penyetoran dana ke rekening kas daerah, serta alur pertukaran data transaksi antara bank dan Bapenda.

Mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan transaksi serta kendala teknis maupun operasional juga akan dibahas dalam forum tersebut.

Digitalisasi sistem pembayaran diharapkan dapat membuat proses pembayaran pajak lebih mudah, cepat dan transparan sekaligus memperkuat integrasi data antara pemerintah daerah dan perbankan.**(Hk)**

Harian JAYA POS Perubahan Menuju Kemajuan
Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:
PT. Media Cipta Jaya Selaras
SK MENKUM & HAM RI:
Nomor: AHU-19831.40.10.2014
Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337
NPWP No: 70.947.655.0-001.000
SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:
Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat
Telp: (021) 23095745
e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id
Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:
Drs. John Hotman Malau, M.Si
Wakil Pemimpin Umum:
Leonardus Pasaribu, SH.
Badar Subur

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Toni Limbong, SH.
Pemimpin Perusahaan: Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi : Anrico Pasaribu, ST., SH.
Sekretaris Redaksi: Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Pahotan Sinaga
Manager Pemasaran/Iklan: Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:
Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu,ST, SH
Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:
A. Ristanto , Charles Limbong
REDAKTUR:
Dede Rostini
DESAIN GRAFIS/IT:
Agus Wiro
PHOTO GRAPHER
Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Rikkot Manik
Riau: .....
Sumatera Selatan: .....
Bangka Belitung: Yustami AI
Jambi: Kusuma Inrda Wijaya
Sumatera Barat: Zakirman
Banten: Guntur Sihombing
Bengkulu:
DKI Jakarta: Jama Berutu
Lampung: Suhaili
Jawa Tengah: M. Sofi
Jawa Barat: Hendry Hutagalung
Jawa Timur: Wiro Utomo
Sulawesi Selatan: Muh. Hakim
Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi
Sulawesi Tengah Heriyanti
Kalimantan Barat : Suhardi
Kalimantan Timur .....

STAF REDAKSI:
JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung | | Sutanto
LITBANG:
Lamser Limbong
SIRKULASI:
Nelson Hutapea
PENASEHAT HUKUM:
Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:
Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.
ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.
Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka
Rek. No. : 1148-01-000156-30-1
a/n PT Media Cipta Jaya Selaras
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot
Rek. No. : 0379-01-002054-50-7
a/n Toni Limbong
- Bank BCA Cab. Daan Mogot
Rek. No. : 1984084008
a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika
Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang
Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Metty Sulistyowati Resmi Nahkodai BPC PHRI Kota Banjar

Banjar, Jaya Pos

Kepengurusan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Banjar resmi dikukuhkan dalam sebuah acara penuh khidmat dan optimisme di Pendopo Wali Kota, Rabu (28/10).

Metty Sulistyowati, S.Sn. secara resmi mengemban amanah sebagai Ketua BPC PHRI Kota Banjar untuk periode mendatang, menandai lembaran baru kebangkitan organisasi pengusaha hotel dan restoran yang sempat vakum sekian lama.

Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjar, Supriana, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi A. Sofiandi beserta jajaran pengurus daerah. Hadir pula, tokoh masyarakat sekaligus sesepuh Banjar Dr. dr. H. Herman Susanto, M.M., Kapolresta Banjar, serta perwakilan BPC PHRI dari berbagai daerah tetangga seperti Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut.

Dalam sambutannya, Metty Sulistyowati menyampaikan rasa syukur dan kehormatan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ditegaskannya bahwa jabatan ini bukanlah tentang kedudukan, melainkan tentang panggilan untuk berjalan bersama, saling menguatkan, dan memberikan kontribusi nyata bagi Kota Banjar. “Saya berharap dengan adanya kepengurusan yang baru ini, kita bisa menghidupkan lagi BPC PHRI Kota Banjar serta berkolaborasi erat dengan Pemerintah Kota, pelaku usaha terkait, sektor perhotelan, restoran, kuliner, UMKM, dan masyarakat luas,” tegas Metty.

Ia juga menyoroti potensi geografis Kota Banjar yang sangat strategis sebagai gerbang penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ke depan, Metty memiliki visi besar agar Kota Banjar bukan hanya menjadi kota yang dilintasi pengendara, tetapi menjadi destinasi wisata tujuan utama di mana pengunjung terkesan dan ingin kembali lagi. “Kami ingin PHRI tidak hanya hadir sebagai organisasi yang memiliki nama, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah yang aktif berdiskusi, memberikan gagasan, dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah,” kata Metty.

Wakil Wali Kota Banjar, Supriana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjar menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas kebangkitan kembali BPC PHRI Kota Banjar.

Supriana menyebut Kota Banjar sebagai wilayah “segitiga emas” yang memiliki posisi sangat strategis dalam sektor jasa dan perdagangan regional. Meski mengakui adanya tantangan fluktuasi ekonomi serta dinamika kunjungan wisata, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan moril penuh kepada PHRI dan asosiasi kemitraan lainnya. “Pemerintah Kota Banjar amat sangat mendukung. Kehadiran organisasi kemitraan seperti PHRI sangat membantu dinamika perkembangan perekonomian daerah. Mari kita bergandengan tangan membangun harmoni untuk memajukan Kota Banjar,” ungkap Supriana.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi A. Sofiandi, memberikan semangat kepada para pengurus baru. Diingatkannya, bahwa mengurus organisasi membutuhkan keikhlasan dan tanggung jawab moral yang tinggi, terutama di tengah tantangan okupansi hotel dan restoran saat ini.

Pihaknya juga menyatakan kesiapan BPD PHRI Jawa Barat untuk mendampingi, termasuk dalam hal pelatihan sumber daya manusia (SDM) demi memperkuat kapasitas anggota di Kota Banjar.

Dalam sesi dialog, disinggung pula mengenai kontribusi sektor perhotelan dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan pajak 10 persen.

Menanggapi hal ini, Metty Sulistyowati menegaskan komitmennya untuk mematuhi aturan yang berlaku demi kemajuan bersama. “Apa yang menjadi aturan dari pemerintah tentu akan saya jalani, karena itu adalah unsur untuk kita saling membantu. Pemerintah juga tidak bisa bergerak tanpa kontribusi pajak. Namun, kita juga berharap ada kebijakan yang proporsional bagi pelaku usaha kecil di bawah ambang batas tertentu agar tetap bisa tumbuh,” tegas Metty.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru BPC PHRI Kota Banjar di bawah kepemimpinan Metty Sulistyowati, dunia pariwisata, perhotelan, dan kuliner di Kota Banjar diharapkan mampu bangkit, berinovasi, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan. **(Mamay)**

Wakil Wali Kota Banjar, H. Supriana, menghadiri Pengukuhan Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Banjar Periode 2026-2031 bertempat di Pendopo Kota Banjar. (Foto:Mamay)

H. Ato Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta Tanah Kampung Kelor, Kerugian Diklaim Capai Belasan Miliar Rupiah

Tangerang, Jaya Pos

Sengketa tanah di Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki babak hukum. H. Ato melalui kuasa hukumnya, Dr. Firdaus Oiwobo, S.H., S.H.I., M.H., menyatakan telah melaporkan sejumlah pihak atas dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan tidak benar dalam akta autentik terkait objek tanah yang disengketakan.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Jaya Pos, kuasa hukum menyebut nama Surya Suyitro dan Sri Lestari Ruspenuji, S.H., yang disebut berprofesi sebagai notaris. Pihak H. Ato mengklaim dugaan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi kliennya hingga belasan miliar rupiah.

Menurut Firdaus Oiwobo, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen serta pencantuman keterangan yang diduga tidak benar dalam akta autentik yang menjadi bagian dari persoalan sengketa tanah tersebut.

Pihaknya menyatakan sejumlah dokumen yang dipersoalkan telah menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan di tingkat kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, keabsahan dokumen serta riwayat peralihan hak atas tanah tersebut masih perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak H. Ato juga mempersoalkan penguasaan tanah yang dinilai dilakukan tanpa persetujuan pemilik. Atas dasar itu, kuasa hukum menyatakan akan terus memperjuangkan hak kliennya melalui jalur hukum guna memperoleh kepastian mengenai status kepemilikan dan keabsahan dokumen yang dipermasalahkan.

Persoalan ini turut menyoroti dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang disebut berkaitan dengan objek sengketa. Riwayat penerbitan, proses peralihan hak, serta kedudukan hukum masing-masing pihak menjadi hal penting yang perlu ditelusuri dan diverifikasi.

Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak Transparan

Pihak H. Ato berharap laporan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap dokumen, proses penerbitan akta, serta keterangan seluruh pihak terkait dinilai penting untuk mengungkap fakta dan memberikan kepastian hukum.

Kuasa hukum juga berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penggunaan dokumen yang keabsahannya masih dipersoalkan.

Jaya Pos akan terus menelusuri perkembangan perkara ini, termasuk memastikan status laporan, materi bukti yang disampaikan pelapor, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam laporan tersebut.

Tetap Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Perlu ditegaskan, dugaan pemalsuan dokumen, dugaan pemberian keterangan tidak benar, maupun klaim kerugian belasan miliar rupiah dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak pelapor yang belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti.

Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan. **(Abd)**

Pirdaus Oiwobo,SH .SHI .MH dan Rekan Fatner Pengacara H ATO. (Foto/Abdullah

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/ Belitung Timur:** Yustami AI (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur **|| Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As’adi (Kepala), Buaji **| Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) **| Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan: Wiro Utomo** (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Momentum Sumpah Pemuda, Bupati Tekankan Peran Pemuda Dalam Persatuan Dan Pembangunan

Sukabumi, Jayapos

Semangat persatuan dan kolaborasi generasi muda menjadi pesan utama dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Agung Ariwibowo, bertindak sebagai pembina upacara, sedangkan Anton Suryanto dari KNPI Kabupaten Sukabumi dipercaya menjadi pemimpin upacara.

Bupati Sukabumi H Asep Japar, Sekretaris Daerah H Ade Suryaman, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, organisasi kemasyarakatan, turut Hadir Juga Ketua DPRD kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali serta tamu undangan turut menghadiri kegiatan tersebut.

Bupati Sukabumi H.Asep Japar Bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali Dalam Acara Peringatan Sumpah Pemuda 2026.(Foto/Humas)

Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakannya, Letkol Inf Agung Ariwibowo menyampaikan bahwa pemuda harus memiliki karakter patriotik, gigih, dan berempati dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui pengabdian nyata, sikap pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Sementara itu, Bupati Sukabumi H Asep Japar menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Bupati berharap generasi muda mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan Kabupaten Sukabumi.

"Pemuda harus terus berjuang menjaga persatuan bangsa dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah," singkatnya.**(YUD)**

Usai Dilantik, Kades Muarah Rusddin ..... *Halaman 7*

kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya.

Rusddin menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ia menginginkan seluruh urusan administrasi masyarakat dapat dilayani secara cepat, tertib, transparan, dan tidak berbelit-belit.

Menurutnya, administrasi pemerintahan yang tertata dengan baik merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Karena itu, pembenahan sistem kerja dan pengelolaan administrasi akan dilakukan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan lebih optimal.

"Ke depan, saya ingin pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Administrasi juga harus kita tertibkan dengan baik agar seluruh pekerjaan pemerintahan desa dapat berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat bisa terlayani," ungkap Rusddin.

Selain pembenahan pelayanan pemerintahan, Rusddin juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penerangan lampu jalan dan ketersediaan air bersih.

Menurutnya, keberadaan lampu penerangan jalan sangat penting untuk menunjang keamanan, kenyamanan, serta aktivitas masyarakat pada malam hari. Sementara itu, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Ia berharap berbagai kebutuhan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dengan mengutamakan skala prioritas, menyesuaikan kemampuan anggaran desa, serta membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Pemberdayaan Kelompok Tani Jadi Perhatian

Di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Rusddin berkomitmen untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat yang ada di Desa Muarah dapat terdata, dibina, dan memperoleh perhatian sesuai bidang kegiatannya.

Kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta kelompok masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. Melalui keberadaan kelompok tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mengembangkan keterampilan, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih mandiri.

Rusddin juga berharap kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat memperoleh akses terhadap berbagai program pembinaan, pendampingan, maupun bantuan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun program pemerintah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal penting lainnya yang menjadi perhatian Rusddin setelah resmi menjabat sebagai kepala desa adalah membangun kembali kebersamaan dan memperkuat persatuan masyarakat pascapemilihan kepala desa.

Ia mengajak seluruh warga, tanpa membedakan pilihan politik pada saat pemilihan, untuk kembali bersatu dan bergandengan tangan membangun Desa Muarah.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, setelah seluruh tahapan pemilihan selesai dan kepala desa terpilih telah dilantik, tidak seharusnya masih ada perbedaan yang menjadi penghalang bagi kebersamaan dan kemajuan desa.

"Dalam pemilihan, tentu setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Itu hal yang biasa. Tetapi sekarang saya sudah menjadi kepala desa, saya berharap kita semua bisa duduk bersama, bergandengan tangan, dan membangun Desa Muarah demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

Rusddin berharap tidak ada lagi sekat maupun perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan pada masa pemilihan. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengambil bagian dalam pembangunan, menyampaikan aspirasi, serta bersama-sama mengawal pelaksanaan program pemerintah desa. Ia menyadari bahwa kemajuan desa tidak dapat diwujudkan hanya oleh kepala desa dan perangkat pemerintahan semata. Dukungan, partisipasi, kritik, serta masukan konstruktif dari masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Rusddin berharap berbagai program prioritas yang telah disiapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Baginya, membangun Desa Muarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. **(Hariyanti)**

Dukung Akses Menuju Kawasan Industri Ngoro ..... *Halaman 7*

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Keberadaan jalan yang memadai diharapkan mampu menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

Ruas jalan Kutogirang–Wotanmas Jedong memiliki peran strategis karena menjadi salah satu jalur penghubung antardesa di Kecamatan Ngoro. Selain menunjang aktivitas warga, jalan tersebut juga berpotensi menjadi jalur alternatif menuju kawasan industri Ngoro Industrial Park (NIP), salah satu kawasan industri yang berada di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data pekerjaan, proyek pelebaran jalan tersebut dilaksanakan oleh CV Prima Adi Jaya dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.274.793.000.

Adapun pekerjaan memiliki volume lebar 5,5 meter dengan panjang 638 meter. Pelaksanaannya berlangsung selama 150 hari kalender, terhitung mulai 22 Juni 2026 hingga 18 November 2026.

Melalui pembangunan ini, pemerintah daerah berharap kondisi jalan semakin memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan. Peningkatan aksesibilitas tersebut juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Ngoro dan sekitarnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, melalui Kepala Bidang Bina Marga, H. Hendri Surya, menjelaskan bahwa pembangunan rehabilitasi, peningkatan, dan pelebaran jalan menuju standar serta pembangunan jembatan merupakan bagian dari program peningkatan infrastruktur daerah.

Menurut Hendri, proyek pelebaran jalan Kutogirang–Wotanmas Jedong menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki nilai strategis karena menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Ngoro sekaligus mendukung akses menuju kawasan industri.

"Program pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan infrastruktur bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelebaran jalan menuju standar pada ruas Kutogirang–Wotanmas Jedong," ungkap Hendri.

Ia menjelaskan, keberadaan ruas jalan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif akses transportasi bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas menuju kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) yang berada di wilayah timur Kabupaten Mojokerto.

Lebih lanjut, Hendri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kondisi fisik jalan, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

"Melalui pembangunan pelebaran jalan ini, kami berharap mobilitas masyarakat semakin lancar, hubungan ekonomi antardesa semakin berkembang, serta distribusi hasil produksi dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional sebagaimana menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat," pungkasnya.

Dengan adanya peningkatan ruas jalan Kutogirang–Wotanmas Jedong, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat berupa akses transportasi yang lebih baik. Selain memperlancar hubungan antardesa, pembangunan tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung perkembangan kawasan industri di Kabupaten Mojokerto. **(Ad)**

Museum Perjalanan Pemilu ..... *Halaman 7*

raan pemilu sekaligus memahami nilai-nilai demokrasi yang perlu dijaga bersama.

Selain menjadi sarana pendidikan, museum ini juga mendukung kegiatan penelitian dan rekreasi edukatif melalui tata pamer yang dirancang informatif dan interaktif. Dengan demikian, pembelajaran mengenai sejarah pemilu diharapkan dapat berlangsung lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, berharap para pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kepada teman-teman sebaya di sekolah masing-masing.

"Mudah-mudahan dengan diundangnya para perwakilan siswa, kurang lebih 80 siswa, mereka mendapatkan bekal keilmuan tentang kepemimpinan demokrasi dan bisa menularkannya kepada teman-teman lainnya di sekolah," ujar Munjirin.

Ia berharap kegiatan edukasi demokrasi ini dapat meningkatkan pemahaman politik yang sehat di kalangan pelajar, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

Melalui kegiatan tersebut, Museum Perjalanan Pemilu diharapkan terus menjadi ruang pembelajaran yang membantu generasi muda mengenal sejarah kepemiluan, memahami nilai-nilai demokrasi, serta mempersiapkan diri menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.**(Jiston)**

Bupati Way Kanan: Akreditasi RSUD ZAPA ..... *Halaman 7*

pek pelayanan untuk menghadapi proses reakreditasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan akreditasi tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen maupun predikat yang diperoleh. Seluruh standar pelayanan dan keselamatan pasien harus diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional rumah sakit.

"Standar pelayanan dan keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai rumah sakit, bukan hanya bersemangat ketika menghadapi survei," tegas Bupati.

Menurutnya, akreditasi harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan dan jajaran rumah sakit menjalankan pelayanan sesuai standar. Komitmen tersebut harus tetap dijaga, baik selama proses survei maupun setelah penilaian selesai.

Penegasan ini sekaligus menjadi pengingat bagi manajemen RSUD ZAPA agar menempatkan peningkatan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama.

Keberhasilan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh hasil penilaian akreditasi, tetapi juga kemampuan memberikan pelayanan yang layak, mudah diakses, profesional, dan manusiawi dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien.

Sebab, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar predikat akreditasi. Pasien membutuhkan tenaga medis yang profesional, pelayanan yang responsif, serta kepastian bahwa keselamatan dan kepentingan mereka menjadi prioritas.

Karena itu, tantangan RSUD ZAPA ke depan adalah membuktikan bahwa komitmen peningkatan mutu yang disampaikan dalam survei akreditasi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan kesehatan sehari-hari bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan. **(Suhaili)**

Tinjau Pelatihan Tenaga ..... *Halaman 7*

Trenggalek dan perusahaan Alfi Putra.Harus didukung bersama, sebab merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan maupun terciptanya lapangan kerja. Diagendakan, secara rutin dan terstruktur akan dilaksanakan berkelanjutan.

Melalui pelatihan-pelatihan seperti ini setidaknya akan membantu memberikan pengalaman dan ketrampilan.

Kapolres ramah itupun berkeyakinan, bahwa inisiasi bersama stakeholder yang sudah berjalan tersebut akan berdampak positif.

Sebab, potensial membuka lapangan pekerjaan lebih luas sehingga tujuan utama membangun Indonesia khususnya di Kabupaten Trenggalek mampu tercapai. "Harapannya, tujuan pemerataan peluang kerja di Trenggalek akan lebih mudah tercapai," harap AKBP Rizky.

Sementara itu, Kabid Perindustrian Disperinaker Kabupaten Trenggalek, Bambang Edi Murjito menambahkan jika pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Polres Trenggalek. Atas adanya kepedulian dalam peran turut mengurangi angka pengangguran di Bumi Menak Sopal.

(HWi)

Pengurus Keluhkan Koperasi ..... *Halaman 7*

ngan kami dalam pengelolaan koperasi belum jelas?" keluh para pengurus.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah dukungan finansial bagi pengurus. Mereka mengaku merasa kurang mendapat perhatian setelah mendengar informasi bahwa manajer KDKMP menerima gaji sekitar Rp6 juta, sedangkan pengurus yang turut bertanggung jawab terhadap kelembagaan koperasi tidak memperoleh gaji.

Selain itu, para pengurus mengaku telah mengeluarkan dana pribadi untuk berbagai kebutuhan administrasi dan pembentukan koperasi. Pengeluaran tersebut meliputi pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan badan hukum melalui notaris, serta biaya rapat dan kebutuhan lainnya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi beban tersendiri bagi pengurus, terlebih ketika koperasi belum beroperasi dan belum memiliki kegiatan usaha yang berjalan.

Atas berbagai persoalan itu, para pengurus meminta dukungan DPRD Kabupaten Langkat untuk memperjuangkan bantuan hibah anggaran bagi forum konsultasi KDKMP. Mereka juga berharap adanya dukungan biaya operasional bagi pengurus agar kegiatan administrasi dan koordinasi tidak terus-menerus dibiayai dari dana pribadi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk membahas persoalan KDKMP bersama instansi terkait.

Ia menilai diperlukan komunikasi dan koordinasi antara pengurus, manajer dan pemerintah daerah agar persoalan yang muncul dapat dibahas secara bersama-sama dan ditemukan solusi yang tepat.

"Nanti setelah manajer KDKMP bertugas mengelola koperasi, sebaiknya kita duduk bersama antara pengurus, manajer, dan pemerintah daerah. Saya akan fasilitasi," ujar Sribana.**(AN)**

PENGUMUMAN TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PT BINTANG SEMBILAN SERASAN

Direksi PT BINTANG SEMBILAN SERASAN ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan suatu rencana perubahan pemegang saham Perseroan yang akan mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan ("**Pengambilalihan**").
Setiap kreditur mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap Pengambilalihan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah pengumuman ini dengan mengirimkan pemberitahuan keberatan secara tertulis kepada Perseroan ke alamat sebagai berikut, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan dasar dari keberatan tersebut:

PT BINTANG SEMBILAN SERASAN
Jalan H. Kolonel Burlian No. 04 B, Kel. Pasar II
Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim,
Prov. Sumatera Selatan

Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 hari kalender, rencana Pengambilalihan akan dianggap telah disetujui.
Pemberitahuan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sumatera Selatan, 31 Oktober 2026
Direksi PT BINTANG SEMBILAN SERASAN

Ngopi Bareng Insan Pers, Kapolres Belitung Perkuat Komunikasi dan Sinergitas

Belitung Jaya Pos

Memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, Kapolres Belitung AKBP Satria Darma, SE, SIK, MM, menggelar silaturahmi bersama puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan online di Warung Kopi Liter O, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan bertajuk Coffee Morning atau ngopi bareng tersebut berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Pertemuan ini menjadi sarana mempererat hubungan kemitraan, membangun komunikasi yang terbuka, serta memperkuat kolaborasi antara Polres Belitung dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Belitung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para wartawan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Menurutnya, hubungan komunikasi yang baik antara kepolisian dan media merupakan bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus menyampaikan berbagai program, kegiatan, dan kinerja kepolisian kepada masyarakat.

"Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir. Semoga melalui kegiatan silaturahmi seperti ini, komunikasi dan kolaborasi antara Polres Belitung dengan insan pers semakin baik," ujar Satria Darma.

Ia berharap kemitraan yang terbangun dapat terus dipelihara melalui komunikasi dan koordinasi yang positif, sejalan dengan semangat Polri untuk semakin dekat dan hadir di tengah masyarakat.

Kapolres hadir didampingi Wakapolres Belitung Kompol Yandrie C. Akip, SH, MH, serta sejumlah pejabat utama Polres Belitung. Kehadiran jajaran kepolisian tersebut sekaligus menunjukkan komitmen membangun hubungan yang harmonis dengan para jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Belitung.

Insan Pers Nopi Bareng dengan Kapolres Belitung. (Foto: Yus)

Pertemuan ini juga diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih luas, khususnya terkait penyampaian informasi kegiatan kepolisian, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut wartawan yang tergabung dalam PWI Belitung, PWRI Belitung, Pokja Wartawan, Perwabel, serta puluhan jurnalis dari berbagai media lokal, regional, dan nasional.

Keberagaman organisasi dan media yang hadir mencerminkan pentingnya membangun komunikasi lintas organisasi profesi. Namun, kemitraan tersebut tetap harus berlandaskan keterbukaan informasi, independensi pers, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Ketua Perkumpulan Wartawan Belitung (Perwabel), Irfan, didampingi Sekretaris Jenderal Yustami AI, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Belitung beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi tersebut.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga komunikasi antara kepolisian dan wartawan semakin terbuka dan konstruktif.

"Terima kasih kepada Kapolres Belitung beserta jajaran yang telah memberikan ruang silaturahmi dan komunikasi bersama insan pers. Kegiatan seperti ini sangat positif untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, saling menghargai, dan memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing," ujar Irfan.

Menurutnya, kegiatan ngopi bareng bukan sekadar pertemuan informal, melainkan juga menjadi kesempatan bagi wartawan untuk bertukar pandangan, menyampaikan masukan, dan membangun komunikasi yang sehat dengan jajaran kepolisian.

Ia menegaskan, kemitraan antara polisi dan wartawan harus tetap menghormati independensi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Belitung juga menyampaikan pentingnya sosialisasi layanan Call Center Polri 110 kepada masyarakat.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk meminta bantuan kepolisian maupun melaporkan berbagai kejadian, mulai dari gangguan keamanan, tindak kriminalitas hingga situasi darurat yang membutuhkan kehadiran petugas.

Melalui layanan 110, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses pelayanan kepolisian dan memperoleh respons cepat sesuai kebutuhan serta penanganan laporan di lapangan.

Kapolres berharap insan pers turut membantu menyebarluaskan informasi mengenai layanan tersebut agar semakin banyak masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya secara tepat.

Irfan menambahkan, media memiliki peran strategis dalam membantu menyampaikan informasi pelayanan publik, termasuk keberadaan Call Center Polri 110, sehingga masyarakat mengetahui saluran resmi untuk memperoleh bantuan kepolisian.

Menurutnya, momentum Hari Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas masing-masing demi kepentingan masyarakat. **(Yustami)**

SDN Tanah Merah 1 Gencarkan Jumat Bersih, Sopiyan Sori: Kebersihan Sekolah Tanggung Jawab Bersama

Sopiyan Sori, Spd Kepala SD Negeri Tanah Merah 1 Sepatan Tangerang Banten. (Foto/Abdullah)

Tangerang Jaya Pos

Komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan nyaman terus diwujudkan SD Negeri Tanah Merah 1, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satunya melalui program Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan setiap pekan dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan tertata, sejalan dengan arahan Bupati Tangerang, Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.M., dalam mendorong kebersihan lingkungan.

Kepala SD Negeri Tanah Merah 1, Sopiyan Sori, saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026), menegaskan bahwa menjaga kebersihan sekolah bukan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas mingguan. Lebih dari itu, kebersihan harus menjadi kesadaran dan budaya bersama seluruh warga sekolah.

Tidak hanya menggelar kegiatan bersih-bersih, SD Negeri Tanah Merah 1 juga memanfaatkan momentum setiap Jumat untuk melaksanakan salat Duha bersama. Kegiatan keagamaan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai spiritual, meningkatkan kedisiplinan, serta membentuk karakter dan akhlak peserta didik sejak dini.

Menurut Sopiyan, pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan nilai-nilai keagamaan.

Di luar tugasnya memimpin SD Negeri Tanah Merah 1, Sopiyan Sori juga aktif mengemban amanah sebagai Ketua PGRI Kecamatan Sepatan Timur. Saat ini, ia turut menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) di SD Negeri Kampung Kelor 3.

Sopiyan berharap program Jumat Bersih dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan tidak berhenti sebagai kegiatan rutin setiap pekan. **(Abd)**

PLt Bupati Pekalongan Sukirman :

Pemkab Pekalongan Raih Mandaya Award 2026, Bukti Nyata Angka Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan Turun

KABUPATEN PEKALONGAN

Kabupaten Pekalongan, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima penghargaan Mandaya Award sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Republik Indonesia atas komitmen tinggi dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Usai menerima penghargaan tersebut, Sukirman menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, apresiasi yang diterima sejalan dengan kondisi di lapangan, yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

"Penghargaan ini atau apresiasi ini menjadi semangat kita dan faktanya memang kemudian di lapangan sangat nyambung karena hari ini menurut sumber Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menurun dari 8,5% di tahun kemarin, sekarang kemudian menjadi 7,8%. Ini artinya pemberian penghargaan ini sekaligus menyemangati kita, menyemangati semangat kita, tetapi juga sekaligus menunjukkan fakta di lapangan," ungkapnya.

Sejalan dengan capaian tersebut,, Sukirman menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta para pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan.

"Tentu kami mengucapkan terima kasih, terutama jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bapperida dan seluruh OPD terkait yang kemudian mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ini bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih," tuturnya.

Lebih lanjut, Sukirman berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh pihak untuk melanjutkan program pembangunan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut membutuhkan kerja sama dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, pemangku kepentingan, hingga badan dan perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, berbagai program pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan memutus mata rantai kemiskinan.

"Harapannya, tentu saja ke depan program-program pembangunan kita akan terus mengarah ke sana, lalu kemudian seluruh masyarakat, stakeholder yang ada, badan-badan yang ada, perusahaan-perusahaan akan rame-rame, sengkuyung bareng-bareng kemudian untuk berkolaborasi untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Sehingga seluruh masyarakat sejahtera, pengangguran, kemiskinan, pengangguran terbuka juga turun, dan yang paling penting adalah semuanya sejahtera untuk memutus mata rantai kemiskinan," tegasnya.

(Adv /pemkab Pekalongan)